

Sri Wahyuni

PENGANTAR EKONOMI ISLAM



ISBN 978-602-5431-79-1



9 786025 431791

PENGANTAR EKONOMI ISLAM

Sri Wahyuni



**RV Pustaka
Horizon**

Anggota IKAPI

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pengantar Ekonomi Islam

© Sri Wahyuni

Samarinda, RV Pustaka Horizon, 2019

x + 174 hlm.; 15,5 x 24 cm

ISBN: 978-602-5431-79-1

Pengantar Ekonomi Islam

Penulis:

Sri Wahyuni

ISBN:

978-602-5431-79-1

Layouter & desainer sampul:

RVPH

Sumber gambar sampul:

pegipegi.com

Penerbit & Percetakan:

RV Pustaka Horizon

Anggota IKAPI

Jl. Perjuangan - Alam Segar 4 No. 73

Samarinda, Kalimantan Timur 75119

www.pustakahorizon.com

Email: pustakahorizon@gmail.com

Tlp./SMS/WA: 0853-4745-6753

Cetakan Pertama: Desember 2019

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, juga pemindaian (scan) komputer tanpa izin tertulis dari penerbit.

Prakata

Buku ini *Pengantar Ekonomi Islam* ini merupakan sebuah referensi dalam mempelajari Sistem Ekonomi Islam atau Syariah. Penulis menyajikan materi dasar-dasar sistem perekonomian menurut hukum syariat Islam. Disajikan pula aneka sistem ekonomi lainnya sebagai perbandingan teori.

Sebelum diterbitkan, naskah buku ini merupakan bahan ajar penulis untuk mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Kemudian, mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa akan pustaka referensi, penulis menerbitkan buku ini.

Penulis berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam terwujudnya karya ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, akademikus, dan segenap pembaca serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Samarinda, 6 Desember 2019

Sri Wahyuni

Daftar Isi

Prakata	v
Daftar Isi	vii
Daftar Singkatan	ix
Bab I Sistem Ekonomi Islam (Syariah)	1
A. Definisi Sistem Ekonomi Islam Menurut Para Ahli.....	2
B. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam	4
C. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	4
D. Tujuan Ekonomi Syariah	7
E. Manfaat Ekonomi Syariah	9
F. Karakteristik Ekonomi Islam (Syariah)	11
G. Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional	17
H. Ciri Khas Ekonomi Syariah	23
I. Potensi Ekonomi Syariah di Indonesia	26
Bab II Sistem Ekonomi Kapitalis	30
A. Definisi Ekonomi Kapitalis	30
B. Karakteristik Ekonomi Kapitalis	34
C. Tokoh-tokoh Kapitalisme Dunia	35
Bab III Sosialisme dan Sistem Ekonomi Sosial	49
A. Sosialisme	49
B. Sistem Ekonomi Sosialis	50
C. Demokrasi Sosial dan Sosialisme Liberal	52
D. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Sosialis dan Ciri-cirinya	53
E. Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis	54
F. Kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis	55
G. Perbandingan antara Sistem Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Sosialis, serta Sistem Ekonomi Kapitalis	56
Bab IV Ragam Sistem Ekonomi Dunia	61
A. Sistem Ekonomi	61
B. Sistem Ekonomi Tradisional	63
C. Sistem Ekonomi Komando (Terpusat)	64

D. Sistem Ekonomi Liberal	64
E. Sistem Ekonomi Campuran	65
F. Definisi Prinsip Ekonomi	66
Bab V Sejarah Ekonomi Islam (Syariah)	70
A. Perekonomian Arab Pra-Islam	70
B. Perekonomian Islam Masa Kenabian (571–632)	72
C. Mekanisme Pasar Masa Rasulullah	79
D. Sumber-sumber Pendapatan Negara pada Masa Rasulullah	85
E. Pengeluaran dan Belanja Negara pada masa Rasulullah	130
F. Pengawasan Keuangan Zaman Rasulullah	136
G. Pengeluaran dan Belanja Pemerintah di Masa Abu Bakar	141
H. Pengeluaran dan Belanja Pemerintah di Masa Umar ibn Khattab.....	142
I. Pengeluaran dan Belanja Pemerintah di Masa Utsman ibn Affan	146
J. Pengeluaran dan Belanja Pemerintah di Masa Ali bin Abi Thalib	152
Bab VI Ekonomi Islam Masa Khulafaur Rasyidin	155
A. Periode Abu Bakar Ash-Shidiq	157
B. Periode Umar bin Khattab	157
C. Periode Utsman bin Affan	158
D. Periode Ali bin Abi Thalib	159
Bab VII Ekonomi Islam Pasca Khulafaur Rasyidin	160
A. Masa Dinasti Bani Umayyah	160
B. Pemikiran Ekonomi Islam dari para Ulama	165
Daftar Pustaka	168
Tentang Penulis	174

Daftar Singkatan

HR	: Hadis Riwayat
r.a.	: radhiyallahu ‘anhu
QS	: Al-Qur’an Surat
saw.	: Shallallahu ‘alaihi wasallam
Swt.	: Subhanahu Wa Ta’ala

BAB I

SISTEM EKONOMI ISLAM (SYARIAH)

Dalam dua dekade terakhir ini, istilah Sistem Ekonomi Islam (SEI) dan Sistem Ekonomi Syariah (SES) telah mengemuka sebagai sebuah pilihan tatanan dalam bidang ekonomi.

Sistem Ekonomi Islam (SEI) adalah suatu sistem ekonomi yang dalam pelaksanaannya berlandaskan Syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al Hadis. SEI mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual-beli, simpan-pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi Islam, semuanya harus sesuai dengan Syariat Islam dengan menghindari perkara yang bersifat *maisyir*, *gharar*, haram, *zhalim*, *ikhhtikar*, dan *riba'*.

Beberapa pihak menyatakan, Sistem Ekonomi Islam adalah Sistem Ekonomi Syariah itu sendiri, karena mengandung sifat-sifat baik dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, namun melepas sifat-sifat buruk dari kedua sistem ekonomi tersebut.

Sebagaimana dipahami bahwa Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah serupa dengan sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari sistem kapitalisme, sistem Ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam konteks Islam

merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah Islam.

Ekonomi Syariah secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Para tokoh Ekonomi Islam memiliki sedikit perbedaan pandangan menyangkut definisi dari ekonomi syariah itu sendiri. Perbedaan tersebut pada dasarnya berakar pada 3 (tiga) masalah utama. Yang pertama adalah perbedaan metodologi yang digunakan dalam membangun sistem ekonomi Islam. Yang kedua adalah perbedaan cara pandang dan penafsiran konsep ekonomi, seperti penafsiran makna khilafah dan implikasi kepemilikan. Perbedaan ketiga adalah perbedaan tafsiran pembangunan ekonomi.

A. Definisi Sistem Ekonomi Islam Menurut Para Ahli

Berikut ini adalah beberapa definisi ekonomi Islam menurut para ahli.

a. Yusuf Qardhawi

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada nilai dan azas ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah Swt.

b. Umer Chapra

Ekonomi Islam atau biasa dipahami sebagai ekonomi syariah, merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya (baik dalam pemahaman secara berkelompok maupun bernegara), melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka (yang memiliki nilai ekonomis tinggi), sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (*al-'iqtidad al-syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di dalam masyarakat.

c. Muh. Nejatullah ash-Shiddiqi

Menurut Shidqi, pengertian ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Hadist (sebagai sumber acuan atau rujukan utamanya), serta alasan dan pengalaman dalam penerapan atau aplikasinya. Ekonomi syariah adalah tanggapan atau respon para pemikir muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi

pada masa tertentu. Dalam hal ini ekonomi dituntun oleh Al-Qur'an dan sunnah serta akal (pengalaman dan ijtihad).

d. S. M. Hasanuzzaman

Menurut Hasanuzzaman, pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memnuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

Ekonomi Islam merupakan pengetahuan, aplikasi dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam permintaan dan pembuangan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia. Tidak hanya itu, Ekonomi Islam juga memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat. Ekonomi syariah merupakan pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

e. Veithzal Rivai dan Andi Buchari

Ekonomi syariah adalah suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling berhubungan, mencakup ilmu Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW serta ilmu-ilmu rasional. Dengan ilmu tersebut, manusia dapat mengatasi keterbatasan sumber daya untuk mencapai kebahagiaan.

f. Muhammad Abdul Manan

Ekonomi Islam adalah Sebuah Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam. Bahwa Ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Alquran, sunnah, ijma dan qiyas.

g. Monzer Kahf

Ekonomi Islam adalah bagian dari Ilmu Ekonomi yang mempunyai sifat interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi Islam ini tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya. Bagi yang lintas keilmuan termasuk di dalamnya terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis*; seperti matematika, statistik, logika, ushul fiqh.

Dari pendapat sejumlah ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah secara lengkap adalah

“ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan kaidah Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. (hadis) yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia serta keseimbangan di dunia dan akhirat”.

B. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam

Dari penjelasan singkat pengertian sistem ekonomi ini, kita dapat mengetahui beberapa karakteristiknya. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum.
- b. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya.
- c. Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari yang Maha Kuasa. Segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia adalah berasal dari Allah sang maha segalanya.
- d. Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum.
- e. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya.
- f. Adanya konsep halal dan haram di mana semua produk (barang dan jasa) harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam.
- g. Adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu.
- h. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman sehingga utang-piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil.
- i. Adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam. Hal ini dianggap menghambat aliran harta dari yang kaya kepada yang miskin dan dianggap sebagai kejahatan besar.

C. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Pada pelaksanaannya, sistem ekonomi Islam haruslah mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia. Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam atau ekonomi Syariah adalah sebagai berikut.

a. Mencegah Kesenjangan Sosial

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS An-Nur: 56).

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”

Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan.

b. Tidak Bergantung Kepada Nasib atau Keberuntungan

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.’...” (QS Al-Baqarah: 219).

Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi dan tidak bergantung pada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi sampai melalaikan kerja keras dan ikhtiar.

c. Mencari dan Mengelola Kekayaan Alam

“Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS Al-Jumuah: 10).

Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia diharuskan mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerja sama dengan orang lain, dan lain-lain.

d. Melarang Praktik Riba

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS Al-Baqarah: 278).

Seperti yang telah disebutkan di atas, sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dalam setiap kegiatan ekonomi karena

dianggap dapat menyengsarakan peminjam dana, khususnya mereka yang kurang mampu.

e. Membuat Catatan Transaksi dengan Jelas

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS Al Baqarah: 282).

Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau masalah di masa depan karena adanya potensi kelalaian atau lupa.

f. Mengutamakan Keadilan dan Keseimbangan dalam Berniaga.

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS Al Isra: 35).

Seluruh sumber daya yang ada merupakan pemberian atau titipan Allah Swt. kepada manusia. Islam mengakui milik pribadi atau kepemilikan seseorang, namun pada batasan terakhir. Dalam ekonomi Islam, penggerak utamanya merupakan kerja sama. Ekonomi Islam melarang kekayaan yang dimiliki hanya oleh beberapa orang saja (monopoli). Ekonomi Islam menganjurkan tentang kepemilikan bersama atau kepemilikan masyarakat. Kepemilikan masyarakat ditujukan untuk kepentingan banyak orang. Seorang muslim harus taat kepada Allah Swt.. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau melewati nisab. Prinsip dasar yang terakhir ialah, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi.

Pelaksanaan ekonomi Islam harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut (Sudarsono, 2002: 105).

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Swt. kepada manusia.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerja sama.
- d. Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.

- e. Ekonomi Syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah Swt. dan hari penentuan di akhirat nanti.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki pondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar lain dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah (Zainuddin Ali, 2008): "Tidak melakukan penimbunan (*Ihtikar*). Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ihthikar*. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal. Tidak melakukan monopoli.

Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang. Menghindari jual-beli yang diharamkan. Kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli yang sangat diridhai oleh Allah Swt.. Karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.

D. Tujuan Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Demikian juga kehidupan di akhirat. Nilai-nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi, karena sesungguhnya Islam itu *Rahmatan lil alamin*. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (*falah*). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam, bisa berubah. Ekonomi syariah memiliki tujuan yang berbeda dari ekonomi konvensional yang memiliki tujuan

utama meningkatkan keuntungan secara pribadi. Dalam ekonomi syariah, tujuannya sejalan dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat dan dapat bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Terdapat 4 (empat) tujuan utama dari ekonomi syariah, sebagai berikut.

1. Menempatkan Ibadah kepada Allah Lebih dari Segalanya

Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang dalam pelaksanaannya dilakukan hanya semata-mata untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Dengan diniatkan untuk ibadah maka kita akan mendapat dua hal sekaligus yaitu harta dan pahala.

2. Menyeimbangkan Kehidupan Dunia dan Akhirat

Dalam ekonomi syariah, kehidupan akhirat tidak boleh dilupakan, karena kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Memang kita wajib bekerja dan mencari uang untuk kebutuhan hidup, namun hal itu tidak boleh membuat kita lupa akan akhirat justru harus menambah kepekaan dan ketaatan kita akan Allah. Inilah golongan yang ingin dicetak oleh ekonomi syariah yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhiratnya. Tujuan Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun aspek makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat (P3EI, 2012: 54).

3. Meraih Kesuksesan Perekonomian yang Diperintahkan Allah Swt..

Ekonomi syariah menjunjung nilai-nilai sosial, sehingga semua orang berhak mendapatkan dan merasakan sebuah keadilan dan bebas untuk berkreasi. Pada dasarnya, prinsip ekonomi syariah adalah mementingkan kemaslahatan umat bukan mudharat, sehingga tujuan sebenarnya bagi ekonomi syariah adalah untuk keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, serta keselamatan harta benda.

4. Menghindari Kekacauan dan Kerusakan

Salah satu tujuan dari ekonomi syariah adalah membentuk suatu pemerintahan yang mampu mengatur perekonomian secara baik, benar dan adil. Agar semua masyarakat bisa merasakan keadilan dan kesejahteraan di manapun mereka berada. Tidak usah diragukan lagi, ekonomi syariah cocok untuk siapa saja. Dengan gabungan nilai-nilai Islam, sistem ekonomi ini menjadi

sempurna dengan tujuan-tujuan luhur yang dimilikinya. Inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi yang lainnya. Meskipun tuntutan zaman yang semakin keras, ekonomi syariah tetap pada keteguhannya yaitu mempertahankan nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya. Kekuatan dari ekonomi syariah adalah dasar hukum yang digunakannya atau yang menjadi acuannya.

Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada 3 (tiga) sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu (Rahman, 1995: 84).

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
- c. Tercapainya masalah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjad puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (*al din*), keselamatan jiwa (*al nafs*), keselamatan akal (*al aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*a nasl*) dan keselamatan harta benda (*al Maal*).

E. Manfaat Ekonomi Syariah

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, yaitu:

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah*, sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keIslamannya belum *kaffah*.
- b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.
- c. Praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah.
- d. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam.
- e. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana

yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan riil.

- f. Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal.

Dalam perspektif keyakinan seorang muslim (masyarakat muslim), setiap aktivitas yang didasarkan pada tuntunan syariah akan membawa manfaat bagi kehidupannya. Pengamalan ekonomi syariah yang jelas dipandang dapat mendatangkan banyak manfaat yang sangat besar bagi umat kemaslahatan Islam itu sendiri, di antaranya sebagai berikut.

- a. Keberkahan

Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Salah satu keunggulan dari ekonomi syariah adalah keberkahan. Dalam praktiknya, seberapapun besarnya harta atau pendapatan yang Anda terima maka akan selalu cukup dengan kebutuhan yang ditanggung.

- b. Tanpa Ada Pihak yang Dirugikan

Dengan mempraktikkan ekonomi berdasarkan syariah Islam, pelaku ekonomi akan mendapatkan nilai ibadah sekaligus menjalankan keadilan. Sistem pembagian keuntungan ekonomi syariah ditetapkan dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati semua pihak.

- c. Distribusi Merata

Dalam skala makro dapat dipastikan penerapan ekonomi syariah akan pemeratakan distribusi pendapatan dan kekayaan seperti halnya era Abdullah Ibnu Umar, pengelolaan *Baitul Maal*, pengelolaan wakaf dan sejenisnya. Dari sinilah peran zakat, infaq, dan sadaqah oleh negara kepada masyarakatnya.

- d. Tahan terhadap Krisis

Banyak ahli yang telah mengakui salah satu keuntungan ekonomi syariah adalah mengurangi kerentanan perekonomian akibat fenomena yang disebut sebagai *decoupling economy*. Melalui sistem bagi hasil, yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam, dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, maka ekonomi syariah membuat tidak adanya jarak antara sektor keuangan dan sektor riil.

e. Pertumbuhan *Entrepreneur* Tanpa *Riba'*

Sistem penerapan ekonomi syariah memiliki prinsip bagi hasil (*lost and profit sharing*) yang merupakan implementasi keadilan dalam roda perekonomian. Salah satu cerminannya adalah dalam produk-produk mudharabah dan musyarakah yang telah diterapkan di Singapura dan Inggris. Dalam penerapan transaksi ekonomi *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola (*entrepreneur*) bersepakat dalam suatu proyek, jika mendapatkan keuntungan maka masing-masing akan mendapat bagian sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dalam kontrak. Jika merugi, maka pihak pertama saja yang kehilangan sebagian dari modalnya dan pihak kedua kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nisbah keuntungan dan imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.

f. Sistem Ekonomi Syariah Tawarkan Keadilan bagi Seluruh Pihak

Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, penerapan sistem ekonomi syariah jelas merupakan pilihan yang sangat menguntungkan. Bukan hanya bagi umat Muslim, namun bagi seluruh masyarakat pelaku ekonomi. Itulah alasannya industri ekonomi syariah di Indonesia berkembang cukup pesat, mulai dari sektor perbankan hingga sektor investasi.

F. Karakteristik Ekonomi Islam (Syariah)

Ekonomi syariah merupakan salah satu konsep perekonomian yang berpegangteguh dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah muncul sebagai jawaban dari keresahan umat Islam yang menganggap sistem konvensional banyak melanggar aturan Islam. Perbedaan utama ekonomi syariah dan ekonomi konvensional adalah nilai-nilai yang digunakan, ekonomi syariah mengutamakan nilai-nilai Islam, sedangkan ekonomi konvensional lebih bebas dan mencangkup semua agama bukan hanya Islam saja. Adapun karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut.

a. **Menggunakan sistem bagi hasil**

Dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya ekonomi syariah mengedepankan sebuah keadilan. Keadilan tersebut diwujudkan dalam bentuk sistem bagi hasil. Maksud dari sistem bagi hasil yakni hasil atau keuntungan dari sebuah aktivitas ekonomi dibagi menjadi dua jadi antara Bank dan nasabah sama-sama untung. Bagi hasil merupakan kebalikan dari bunga yang dianggap riba dalam Islam. Pada dasarnya dalam Islam memang praktek riba dalam bentuk sistem bunga telah dilarang yakni terdapat dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278–279. Bisa dibayangkan sistem bagi hasil ini

menjadi jawaban dari dilarangnya sistem bunga, dengan menggunakan sistem ini nasabah tetap mendapatkan sebuah keuntungan dari aktivitas menabungnya namun tetap dalam koridor Islamiyah.

b. Memadukan antara Nilai spiritual dan Material

Bukan berarti dalam ekonomi syariah para nasabahnya atau pelaku ekonomi tidak mendapatkan keuntungan. Kehadiran ekonomi syariah adalah untuk membantu para nasabah dalam mendapatkan keuntungan secara Islami atau dalam koridor nilai-nilai Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya dihiasi dengan materialisme atau berfokus pada keuntungan saja tak peduli apa yang akan mereka terima. Namun di ekonomi syariah inilah terjadi keseimbangan antara material atau keuntungan dengan nilai-nilai spiritual. Maksud dari pernyataan ini adalah dalam ekonomi syariah ini para nasabah dan pelaku ekonomi diharapkan mampu mengamalkan sebuah aktivitas di mana mereka mengesampingkan sebagian hartanya untuk yang membutuhkan baik untuk zakat, infaq maupun shodaqah.

c. Memberikan Kebebasan sesuai dengan Nilai Islami

Mungkin banyak dari kita menganggap dengan adanya landasan nilai-nilai Islam kita sebagai pelaku ekonomi dibatasi dalam praktek atau kegiatan kita, hal ini kurang benar. Karena pada dasarnya dalam ekonomi syariah setiap individu diberikan kebebasan dalam bertindak dan berperilaku dalam perekonomian mereka diberikan hak dan kewajiban sesuai apa yang mereka kerjakan. Jadi setiap individu akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi perekonomian. Namun kebebasan yang dimaksud di sini bukan kebebasan yang menyeluruh dan seenaknya sendiri serta tanpa batas-batas, setiap individu memang diberikan kebebasan namun dibatasi dengan landasan syar'iyah atau nilai-nilai Islam, jadi mereka harus mempertanggungjawabkan segala apa yang mereka kerjakan.

d. Mengakui Kepemilikan Multijenis

Yang dimaksud dengan kepemilikan multijenis yakni kepemilikan dana atau semua harta dalam perekonomian adalah mutlak milik Allah, kepemilikan manusia sebenarnya adalah hanya titipan dari Allah. Manusia diberikan dana atau harta untuk diolahnya dengan baik sehingga mampu menghasilkan sebuah hasil yang bermanfaat bagi semua pihak atau kemaslahatan umum. dengan adanya kesadaran akan hal ini maka dipastikan manusia akan

BAB II

SISTEM EKONOMI KAPITALIS

A. Definisi Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme atau *capitalism* adalah sistem ekonomi dengan perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin terlebih dahulu, kemudian buruh yang berperan sebagai operator mesin guna mendapatkan nilai dari bahan baku yang diolah.

"Capitalism, as a mode of production, is an economic system of manufacture and exchange which is geared toward the production and sale of commodities within a market for profit, where the manufacture of commodities consists of the use of the formally free labor of workers in exchange for a wage to create commodities in which the manufacturer extracts surplus value from the labor of the workers in terms of the difference between the wages paid to the worker and the value of the commodity produced by him/her to generate that profit." (Chris Jenks. *Core Sociological Dichotomies* London, England, UK; Thousand Oaks, California, USA; New Delhi, India: SAGE. p. 383).

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya perubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu.

Istilah kapitalisme, dalam arti modern, sering dikaitkan dengan Karl Marx. Dalam *Magnum Opus Das Kapital*, Marx menulis tentang 'cara produksi kapitalis' dengan menggunakan metode pemahaman yang sekarang dikenal sebagai Marxisme. Namun, sementara Marx jarang menggunakan istilah kapitalisme, namun digunakan dua kali dalam interpretasi karyanya yang lebih politik, terutama ditulis oleh kolaborator Friedrich Engels. Pada abad ke-20 pembela sistem kapitalis sering menggantikan kapitalisme jangka panjang dengan frasa seperti perusahaan bebas dan perusahaan swasta dan diganti dengan kapitalis rente dan investor sebagai reaksi terhadap konotasi negatif yang terkait dengan kapitalisme.

Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan sarana produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan menghasilkan keuntungan dalam ekonomi pasar. Para pemilik modal dapat melakukan bisnis mereka untuk mencapai keuntungan maksimum. Untuk alasan itu, pemerintah tidak dapat campur tangan di pasar untuk saling menguntungkan, tetapi intervensi pemerintah dilakukan dalam skala besar untuk keuntungan pribadi. Namun, kapitalisme tidak memiliki definisi universal yang diterima secara luas. Beberapa sarjana mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem yang mulai mendominasi di Eropa pada abad keenam belas sampai abad kesembilan belas, pada saat perkembangan perbankan komersial Eropa di mana

sekelompok individu dan kelompok dapat bertindak sebagai entitas tertentu yang dapat memiliki atau menjual properti pribadi, seperti tanah dan orang-orang untuk memproses perubahan barang modal menjadi barang jadi. Untuk mendapatkan modal ini, kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin terlebih dahulu, pekerja baru sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku ini.

Kapitalisme memiliki sejarah panjang, sejak penciptaan sistem perdagangan yang dilakukan oleh sektor swasta. Di Eropa, ini dikenal sebagai persatuan sebagai pionir kapitalisme. Hari ini, kapitalisme dilihat sebagai bukan pandangan hidup yang ingin untung. Persatuan kapitalisme dengan sosialisme yang tidak berubah membuat kapitalisme lebih lembut dari dua atau tiga abad yang lalu. Istilah kapitalisme, dalam pengertian modernnya, sering dikaitkan dengan Karl Marx. Di ibukota, Marx menulis tentang mode produksi kapitalis menggunakan metode pemahaman yang sekarang dikenal sebagai Marxisme. Namun, meskipun Marx jarang menggunakan istilah kapitalisme, istilah ini digunakan dua kali dalam interpretasi atas karya politiknya, terutama ditulis oleh kolaborator Friedrich Engels. Pada abad ke-20, sistem kapitalis sering menggantikan kapitalisme jangka panjang dengan frasa seperti perusahaan bebas dan perusahaan swasta dan digantikan oleh rente kapitalis dan investor sebagai reaksi terhadap konotasi negatif yang terkait dengan kapitalisme.

Kritik kapitalisme mengasosiasikannya dengan kesenjangan sosial dan distribusi yang tidak adil dari kekayaan dan kekuasaan; kecenderungan monopoli pasar atau oligopoli (dan pemerintah oleh oligarki), imperialisme, perang kontra-revolusioner dan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan budaya; materialisme, represi pekerja dan anggota serikat buruh, alienasi sosial, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Hak milik pribadi juga telah dikaitkan dengan tragedi *anticommons*. Kritikus terkemuka dari kapitalisme telah menyertakan: sosialis, anarkis, komunis, sosialis nasional, sosial demokrat, teknokrat, beberapa jenis dari konservatif, Luddites, Narodnik, Shaker, dan beberapa jenis nasionalis lainnya.

Marxis telah menganjurkan penggulingan revolusioner dari kapitalisme yang akan memimpin ke sosialisme, sebelum akhirnya berubah menjadi komunisme. Banyak sosialis menganggap kapitalisme menjadi tidak rasional, dalam produksi dan arah ekonomi tidak direncanakan, menciptakan banyak inkonsistensi dan kontradiksi internal. Sejarahwan tenaga kerja dan cendekiawan seperti Immanuel Wallerstein berpendapat bahwa tidak bebas

tenaga kerja-oleh para budak, pembantu dengan perjanjian, tahanan, dan orang-orang lainnya dipaksa-kompatibel dengan hubungan kapitalis.

Ekonom Marxis Richard D. Wolff mendalilkan bahwa ekonomi kapitalis memprioritaskan keuntungan dan akumulasi modal atas kebutuhan sosial masyarakat, dan perusahaan kapitalis jarang pernah menyertakan pekerja dalam keputusan-keputusan dasar dari perusahaan.

Banyak aspek kapitalisme telah datang di bawah serangan dari gerakan anti-globalisasi, yang terutama menentang kapitalisme korporasi. Para pegiat lingkungan berpendapat bahwa kapitalisme membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, dan bahwa hal itu pasti akan menguras sumber daya alam terbatas di Bumi. Kritik tersebut berpendapat bahwa sementara neoliberalisme ini, atau kapitalisme kontemporer, memang meningkatkan perdagangan global, tetapi juga memungkinkan meningkat kemiskinan global.- dengan lebih hidup hari ini dalam kemiskinan dari sebelumnya neoliberalisme, dan indikator lingkungan menunjukkan kerusakan lingkungan besar-besaran sejak akhir 1970-an.

Setelah krisis perbankan tahun 2007, Alan Greenspan mengatakan kepada Kongres Amerika Serikat pada tanggal 23 Oktober 2008, 'Bangunan intelektual seluruhnya runtuh. Aku membuat kesalahan dalam menganggap bahwa kepentingan-diri dari organisasi, khususnya bank dan lain-lain, adalah seperti bahwa mereka yang terbaik yang mampu melindungi pemegang saham mereka sendiri. ...aku terkejut.'

Banyak agama mengkritik atau menentang unsur-unsur tertentu dari kapitalisme. Tradisional Yahudi, Kristen, dan Islam melarang meminjamkan uang dengan bunga, meskipun metode alternatif perbankan telah dikembangkan. Beberapa orang Kristen telah mengkritik kapitalisme untuk aspek materialis, dan ketidakmampuannya untuk memperhitungkan kesejahteraan semua orang. Banyak perumpamaan Yesus berurusan dengan masalah ekonomi: Pertanian, penggembalaan, berada di utang, melakukan kerja paksa, dikucilkan dari perjamuan dan rumah-rumah orang kaya, dan memiliki implikasi untuk kekayaan dan distribusi kekuasaan.

Dalam 84 halaman himbauan *Apostolik Evangelii Gaudium*, Paus Francis menggambarkan terkekang kapitalisme sebagai tirani baru dan menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk memerangi meningkatnya kemiskinan dan ketidaksetaraan. Di dalamnya ia mengatakan: 'Beberapa orang terus membela teori

trickle-down yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi, didorong oleh pasar bebas, pasti akan berhasil dalam mewujudkan keadilan yang lebih besar dan inklusivitas di dunia.' Meskipun pendapat ini, belum pernah dikonfirmasi oleh fakta, mengungkapkan kepercayaan mentah dan naif dalam kebaikan mereka memegang kekuatan ekonomi dan sakralisasi kerja dari sistem ekonomi yang berlaku. Sementara itu, yang dikecualikan masih menunggu. Dapat disimpulkan bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan setiap orang kebebasan penuh untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti produksi barang, penjualan barang, distribusi barang, dan kegiatan ekonomi lainnya untuk mendapatkan keuntungan.

B. Karakteristik Ekonomi Kapitalis

Dalam ekonomi kapitalis setiap warga negara dapat mengelola nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Setiap orang bebas bersaing dalam bisnis untuk mendapatkan laba terbanyak. Setiap orang bebas bersaing untuk persaingan bebas dalam banyak hal. Sistem ekonomi dan politik ini dapat didefinisikan berdasarkan karakteristiknya. Karakteristik dari ideologi kapitalisme adalah sebagai berikut:

- e. Ada pengakuan hak properti individu untuk berbagai faktor produksi, termasuk sumber daya alam. Hal ini sebagai pengakuan luas tentang hak-hak pribadi.
- f. Ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Sektor swasta, baik perorangan maupun perusahaan, memiliki kebebasan untuk memiliki peralatan dan aset produksi (bangunan, mobil, bahan baku). Kepemilikan penarikan di tangan individu. Pasar kerja memberikan 'sinyal' kepada produsen dan pengguna dalam bentuk harga.
- g. Setiap orang dapat bersaing dalam bisnis, menggunakan metode apa pun untuk mendapatkan manfaat maksimal. Motivasi yang mendorong ekonomi untuk mendapatkan keuntungan.
- h. Sektor swasta dapat dengan bebas menentukan apa yang akan diproduksi, jumlah dan berapa harga produk tergantung pada permintaan pasar.
- i. Pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Meskipun pemerintah dapat mengelola proses ekonomi, pemerintah tidak dapat membatasi aktivitas dan properti pemilik modal. Intervensi pemerintah harus dijaga sekecil mungkin. The '*Invisible Hand*' yang mengatur ekonomi menjadi efisien.
- j. Sistem kapitalis akan membentuk perilaku individualistis setiap orang dalam masyarakat yang ditandai oleh sifat materialisme.

Manusia dilihat sebagai homo-ekonom, yang selalu mengejar kepentingan mereka sendiri.

- k. Orang yang hidup dalam sistem kapitalis cenderung berperilaku hedonisme karena mereka telah dipengaruhi oleh berbagai iklan produk yang dijual oleh pengusaha. Ide individualisme didasarkan pada materialisme, warisan Yunani Kuno (disebut hedonisme).

1. Kelebihan Kapitalisme

- a. Itu cenderung lebih efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya dan mendistribusikan barang.
- b. Orang menjadi lebih kreatif karena mereka ingin meningkatkan diri agar dapat bersaing.
- c. Pertumbuhan ekonomi semakin cepat karena persaingan pasar.
- d. Kami menghargai kerja keras seseorang dalam bisnis.
- e. Konsumen dapat mengendalikan pasar karena persaingan harga antar perusahaan.

2. Kurangnya Kapitalisme

- a. Munculnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik.
- b. Persaingan antara perusahaan sering menyebabkan konflik dan ketidakadilan, ketika hanya pengusaha besar yang menjadi pemimpin pasar.
- c. Sistem kapitalis membuat ekonomi hanya uang, sehingga pengusaha menjadi materialis.
- d. Perusahaan besar hanya berfokus pada keuntungan, sehingga mereka sering menangkap perusahaan kecil.
- e. Munculnya eksploitasi sumber daya alam untuk mencari keuntungan maksimal.
- f. Munculnya ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, ketika hanya segelintir orang dapat menikmati kekuasaan dan kekayaan.

C. Tokoh-tokoh Kapitalisme Dunia

Pemerintah mendominasi bidang perdagangan selama berabad-abad, yang mana kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan ekonomi. Para pemikir ini mulai beranggapan bahwa para borjuis, yang pada era sebelumnya mulai memegang peranan penting dalam ekonomi perdagangan yang didominasi negara atau lebih dikenal dengan merkantilisme, seharusnya mulai melakukan perdagangan dan produksi guna menunjang pola kehidupan masyarakat. Beberapa juga menjelaskan pentingnya kapitalisme

sebagai sistem ekonomi dan politik di mana perdagangan dan industri negara dikendalikan oleh pemilik swasta untuk mendapatkan keuntungan, dan bukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, dalam sistem kapitalis, pemerintah hanya bertindak sebagai badan pengawas. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, setiap orang dapat menentukan nasib mereka sendiri dan bersaing secara bebas dalam kegiatan wirausaha untuk mendapatkan manfaat maksimal. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai pihak yang menjamin kontinuitas dan kesinambungan kegiatan ekonomi, tetapi juga tidak memiliki intervensi pemerintah. Untuk lebih memahami apa itu kapitalisme, kita bisa beralih ke pendapat para pakar berikut:

a. Adam Smith

John Adam Smith (lahir di Kirkcaldy, Skotlandia, 5 Juni 1723 – meninggal di Edinburgh, Skotlandia, 17 Juli 1790 pada umur 67 tahun), adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Karyanya yang terkenal adalah buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (disingkat *The Wealth of Nations*) adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi Kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat dan pada abad 19 mulai terkenal di sana.

Kemakmuran Negara (*Wealth of Nations*) dan yang lebih kecil pengaruhnya Teori Moral Sentimen, telah menjadi titik awal untuk segala pertahanan atau kritik atau bentuk kapitalisme, yang terpenting dalam tulisan Marx dan ekonomi manusia. Karena kapitalisme *laissez-faire* seringkali dihubungkan dengan keegoisan tak terkontrol, ada gerakan baru yang menekankan filosofi moral Smith, dengan fokus simpati kepada seseorang.

Ada beberapa kontroversi tentang keaslian Kemakmuran Negara Smith; beberapa orang menyangkal hasil kerjanya hanyalah tambahan biasa kepada kerja pemikir seperti David Hume dan Baron de Montesquieu. Dan, banyak teori-teori Smith hanya menggambarkan trend sejarah menjauh dari merkantilisme, menuju perdagangan-bebas, yang telah berkembang selama beberapa dekade, dan telah memiliki pengaruh yang nyata dalam kebijakan pemerintah. Namun begitu, buku ini mengorganisasi pemikiran-pemikiran mereka secara luas, dan tetap menjadi suatu buku yang paling berpengaruh dan penting dalam bidangnya sekarang ini.

Adam Smith adalah seorang tokoh ekonomi kapitalis klasik yang mengkritik sistem merkantilisme yang dianggapnya kurang

mendukung ekonomi masyarakat. Ia mengkritik para psiokrat yang menganggap tanah adalah sesuatu yang paling penting dalam pola produksi. Gerakan produksi haruslah bergerak sesuai konsep MCM (*Modal-Comodity-Money*, modal-komoditas-uang), yang menjadi suatu hal yang tidak akan berhenti karena uang akan beralih menjadi modal lagi dan akan berputar lagi bila diinvestasikan. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (*invisible hand*), maka pasar harus memiliki *laissez-faire* atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Kapitalisme adalah sistem yang dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat jika pemerintah tidak mengganggu mekanisme dan kebijakan pasar.

Adam Smith dikenal luas dengan teori ekonomi *laissez-faire* yang mengumumkan perkumpulan di abad 18 Eropa. Smith percaya akan hak untuk memengaruhi kemajuan ekonomi diri sendiri dengan bebas, tanpa dikendalikan oleh perkumpulan dan/atau negara. Teori ini sampai pada proto-industrialisasi di Eropa, dan mengubah mayoritas kawasan Eropa menjadi daerah perdagangan bebas, membuat kemungkinan akan adanya pengusaha. Dia juga dikenal sebagai Bapak Ekonomi versi barat.

b. Karl Max

Dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang revolusioner, terutama paham komunisme, sehingga ia dijuluki sebagai 'Bapak Komunis'. Ia juga dikenal sebagai tokoh Sosialis Revolusioner. Karl Marx dikenal sebagai seorang filsuf, ahli sosiologi, pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan. Karl Marx lahir di Trier, Prusia, yang kini menjadi wilayah Jerman pada 5 Mei 1818. Ayahnya Heinrich Marx, seorang pengacara, menafkahi keluarganya dengan relatif baik, khas kehidupan kelas menengah. Ibunya bernama Henriette Pressburg. Orang tua Karl Marx berasal dari Pendeta Yahudi (Rabbi). Sangat sedikit informasi yang diketahui mengenai masa kecil Karl Marx, Namun sejak kecil ia mendapat pendidikan secara pribadi oleh ayahnya. Namun pada tahun 1830, Karl Marx masuk di *Trier High School*.

Setelah berumur 17 tahun, Karl Marx diterima kuliah di Universitas Bonn. Karl Marx sangat ingin mempelajari filsafat dan sastra namun ayahnya bersikeras memasukkan ia ke Jurusan Hukum. Di sini ia bergabung dalam komunitas sastrawan yang mempunyai pemikiran radikal. Tahun 1841 Karl Marx menerima gelar doktor filsafat dari Universitas Berlin, Universitas yang sangat dipengaruhi oleh Hegel dan guru-guru muda penganut filsafat Hegel, tetapi

berpikir kritis, membosankan, tetapi kajian itu mendahului berbagai gagasannya yang muncul kemudian. Setelah tamat ia menjadi penulis untuk sebuah koran liberal radikal dan dalam tempo 10 (sepuluh) bulan ia menjadi editor kepala koran itu.

Tetapi karena pendirian politiknya, koran itu kemudian di tutup pemerintah. Esai-esai awal yang diterbitkan dalam periode mulai mencerminkan sebuah pendirian yang membimbing Karl Marx sepanjang hidupnya. Esai-esai tulisan Karl Marx itu secara bebas ditaburi prinsip-prinsip demokrasi, ia menolak keabstrakatan filsafat Hegelian, mimpi naif komunis utopia dan gagasan aktivis yang mendesak apa yang ia anggap sebagai tindakan politik prematur. Dalam menolak gagasan aktivis ini Karl Marx meletakkan landasan bagi gagasan hidup sendiri. Karl Marx meninggalkan Jerman saat mendapatkan suasana yang lebih liberal di Paris. Di Paris ia bergulat dengan gagasan Hegel dan pendukungnya, tetapi ia juga menghadapi 2 (dua) kumpulan gagasan baru—Sosialisme Prancis dan Politik Ekonomi Inggris. Dengan cara yang unik dia menggabungkan Hegelian, Sosialisme dan Ekonomi Politik yang kemudian menentukan orientasi intelektualnya. Hal yang sangat penting pula adalah pertemuannya dengan orang yang kemudian menjadi teman seumur hidupnya, donatur dan kolaboratornya yakni Fredrich Engels (Carver, 1983).

Dalam Biografi Karl Marx diketahui bahwa Engels adalah anak penguasa pabrik tekstil menjadi seorang sosialis yang mengkritik kondisi kehidupan yang di hadapi kelas buruh. Banyak di antara rasa kasihan Marx kesengsaraan kelas buruh berasal dari paparannya kepada Fredrich Engels dan gagasannya sendiri. Tahun 1844 Karl Marx dan Fredrich Engels mengadakan diskusi panjang di sebuah Café terkenal di Paris dan meletakkan landasan kerja untuk bersahabat seumur hidup. Mengenai diskusi itu Fredrich Engels berkata: 'Kesepakatan lengkap kami dalam semua bidang teori menjadi nyata....dan perjanjian kerja sama kami mulai sejak itu' (McLellan, 1993: 131).

Di tahun berikutnya Fredrich Engels menerbitkan karya *The Condition Of The Working Class in England*. Tertarik Selama periode itu Marx menerbitkan sejumlah karya yang sangat sukar di pahami (kebanyakan belum diterbitkan semasa hidupnya) termasuk *The Holy Family* dan *The German ideology* (di tulis bersama Engels) dan ia pun menulis *The Economic and Philosophic Manuscripts* 1844 yang menandakan perhatiannya terhadap bidang ekonomi makin meningkat.

Meski Karl Marx dan Fredrich Engels mempunyai orientasi teoritis yang sama, namun ada juga beberapa perbedaan di antara

mereka. Karl Marx cenderung menjadi seorang intelektual teoritis yang kurang teratur dan sangat berorientasi kepada keluarga. Sementara Fredrich Engels adalah pemikir praktis, rapi dan pengusaha teratur serta sebagai seorang yang tak percaya pada lembaga keluarga. Meski mereka berbeda, Karl Marx dan Fredrich Engels menempa kerja sama yang akrab sehingga mereka berkolaborasi menulis buku dan artikel dan bekerja sama dalam organisasi radikal. Bahkan Engels membantu membiayai Marx selama sisa hidupnya sehingga memungkinkan Marx mencurahkan perhatiannya pada kegiatan intelektual dan politiknya. Meski ada asosiasi erat antara nama Karl Marx dan Fredrich Engels, namun Engels menjelaskan bahwa ia teman junior. Karl Marx mampu berkarya sangat baik tanpa aku. Aku tidak pernah mencapai prestasi seperti yang dicapai Karl Marx.

Pemahaman Karl Marx lebih tinggi, pengalamannya lebih jauh dan pandangannya lebih luas serta cepat ketimbang aku. Marx adalah jenius (Engels, dikutip dalam McLellan, 1973; 131–132). Banyak yang percaya bahwa Engels gagal memahami berbagai seluk beluk Marx. Setelah Marx meninggal, Engels menjadi juru bicara utama bagi teori Marxian dan dalam berbagai cara menyimpangkan dan terlalu menyerderhanakannya, meski ia tetap setia terhadap perspektif politik yang ia tempa bersama Marx. Karena beberapa tulisannya telah mengganggu Pemerintahan Prusia, Pemerintah Perancis (atas permohonan Prusia) mengusir Marx tahun 1845 dan karenanya Marx pindah ke Brussel. Radikalismenya meningkat dan ia menjadi anggota aktif di bidang gerakan Revolusioner Internasional. Ia pun bergabung dengan Liga Komunis dan bersama Engels diminta menulis anggaran dasar Liga, hasilnya adalah Manifesto Komunis 1848, yang merupakan sebuah karya besar yang ditandai oleh slogan-slogan politik yang termasyur: misalnya 'KAUM BURUH SELURUH DUNIA BERSATULAH!!

Tahun 1849 Karl Marx pindah ke London, Inggris dan, mengingat kegagalan revolusi politik tahun 1848, ia menarik diri dari aktivitas revolusioner dan beralih ke kegiatan riset yang lebih rinci tentang peran sistem kapitalis. Studi Karl Marx ini akhirnya menghasilkan 3 (tiga) jilid buku yang bernama '*Das Kapital*'. Jilid pertama diterbitkan pada tahun 1867; kedua jilid yang lainnya di terbitkan sesudah ia meninggal. Selama riset dan menulis itu, ia hidup dalam kemiskinan, membiayai hidupnya secara sederhana dari honorarium tulisannya dan bantuan dana dari Engels. Tahun 1864 Karl Marx terlibat kembali dalam kegiatan politik, bergabung dengan '*The Internasional*', sebuah gerakan buruh internasional. Karl Marx

BAB III

SOSIALISME DAN SISTEM EKONOMI SOSIAL

A. Sosialisme

Sosialisme adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut. Kepemilikan sosial bisa merujuk pada kepemilikan negara, kolektif, koperasi, kepemilikan sosial atas ekuitas, atau kombinasi dari semuanya. Ada banyak tipe sosialisme dan tidak ada definisi tunggal secara menyeluruh menjelaskan mereka semua, dengan kepemilikan sosial menjadi unsur utama yang dimiliki berbagai tipe sistem ini. Sosialis merujuk pada orang yang menganut paham sosialisme.

Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Prancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada 1832, dan dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam *l'Encyclopédie Nouvelle*. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat *egalitarian* dengan sistem ekonomi yang menurut mereka dapat melayani masyarakat luas, tidak hanya segelintir elite saja. Gerakan politik sosialis mencakup beragam filsafat politik. Dikotomi utama dalam gerakan sosialis di antaranya perbedaan

antara reformisme dan sosialisme revolusioner; serta antara sosialisme negara dan sosialisme libertarian. Sosialisme negara menganjurkan nasionalisasi alat-alat produksi sebagai strategi untuk menerapkan sosialisme, sementara sosialis libertarian umumnya berupaya dengan cara desentralisasi demokrasi langsung seperti majelis, serikat buruh, dan dewan pekerja, yang muncul dari sikap anti-otoriter umum. Sosialisme demokratik menyoroiti peran sentral proses demokrasi dan sistem politik dan biasanya kontras dengan gerakan politik non-demokratis yang mendukung sosialisme. Beberapa sosialis juga mengadopsi gagasan sistem ini di gerakan sosial lainnya, seperti lingkungan, feminisme dan liberalisme.

B. Sistem Ekonomi Sosialis

Ekonomi sosialis merujuk pada teori dan praktik ekonomi, dan norma sistem ekonomi sosialis yang ada dan hipotetis. Sistem ekonomi sosialis dikarakteristikan oleh kepemilikan sosial dan kontrol demokratis atas alat produksi, yang dapat berbentuk koperasi otonom atau kepemilikan publik secara langsung; yaitu tempat produksi dilaksanakan untuk penggunaan secara langsung. Ketika pasar digunakan untuk pengalokasian pemasukan dan barang modal antar unit ekonomi, maka digunakanlah sosialisme pasar, sistem ekonomi menggunakan ekonomi sosialis terencana. Istilah ekonomi sosialis dapat pula digunakan untuk menganalisis sistem ekonomi terdahulu dan sekarang yang menyebut dirinya sosialis, seperti dalam tulisan ekonom Hungaria János Kornai.

Ekonomi sosialis telah diasosiasikan dengan berbagai aliran pemikiran ekonomi. Ekonomi Marxis menyediakan fondasi bagi sosialisme tentang analisis kapitalisme, sedangkan ekonomi neoklasik dan ekonomi revolusioner menyediakan model komprehensif sosialisme. Selama abad ke-20, anjuran dan model untuk ekonomi terencana dan sosialisme pasar sangat dipengaruhi oleh ekonomi neoklasik atau sintesis dari ekonomi neoklasik dengan ekonomi Marxis atau ekonomi institusional. Sistem Ekonomi Sosialis merupakan sistem perekonomian yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Pemerintah praktis menguasai dan mengendalikan kegiatan ekonomi, sedangkan hak milik, kebebasan pasar serta inisiatif ekonomi individu sangat dibatasi, atau bahkan ditekan.

Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang diatur oleh negara. Didalam sistem ini berlangsungnya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat. Sistem ini telah banyak digunakan oleh negara-negara di

Eropa Timur yang menganut paham komunis. Sistem Sosialis adalah sistem yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut. Kepemilikan sosial bisa merujuk ke koperasi, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan warga ekuitas, atau kombinasi dari semuanya. Ekonomi sosialis bermula pada premis bahwa setiap individu tidak hidup atau bekerja dalam kesendirian tetapi bekerja sama dengan yang lainnya. Selanjutnya, semua yang dihasilkan individu dalam beberapa arti merupakan produk sosial, dan setiap orang yang berkontribusi pada produksi barang berhak mendapat bagian di dalamnya. Masyarakat sebagai keseluruhan, selanjutnya, harus memiliki atau setidaknya mengontrol properti tersebut untuk kepentingan semua anggotanya. Konsepsi asli sosialisme adalah sistem ekonomi yang produksinya diatur secara langsung menghasilkan barang dan jasa untuk kegunaan mereka (atau nilai-guna dalam ekonomi klasik dan Marxian): alokasi langsung sumber daya dalam istilah unit fisik yang bertentangan dengan perhitungan finansial dan hukum ekonomi kapitalisme (lihat hukum nilai), sering melibatkan kategori terakhir ekonomi kapitalistik seperti sewa, bunga, laba, dan uang. Dalam ekonomi sosialis yang berkembang sepenuhnya, produksi dan penyeimbangan masukan dan keluaran faktor menjadi proses teknis yang harus dilakukan oleh para insinyur.

Sosialisme pasar merujuk pada berbagai tatanan teori dan sistem ekonomi yang menggunakan mekanisme pasar untuk mengatur produksi dan mengalokasikan masukan faktor di antara perusahaan yang dimiliki secara sosial, dengan surplus ekonomi (laba) dikumpulkan kepada masyarakat dalam bentuk dividen sosial dibandingkan dengan pemilik modal swasta. Variasi sosialisme pasar termasuk anjuran libertarian seperti mutualisme yang berbasis pada ekonomi klasik, dan model ekonomi neoklasik seperti Model Lange. Bagaimanapun, sebagian ekonom seperti Joseph Stiglitz, Mancur Olson dan lainnya yang tidak secara khusus memajukan posisi anti-sosialis, menunjukkan bahwa model ekonomi yang mungkin berdasar pada model sosialisme demokratis atau pasar, memiliki kelemahan logika atau perkiraan yang tidak dapat bekerja.

Gerakan politik sosialis utama dijabarkan di bawah ini. Teoretikus sosialis independen, penulis sosialis utopia dan pendukung akademis sosialis mungkin tidak terwakili dalam gerakan-gerakan ini. Beberapa kelompok politik menyebut dirinya sosialis meski oleh beberapa dianggap berkebalikan dengan sosialisme. Istilah 'sosialis' juga dipakai oleh beberapa politisi sayap

kanan sebagai julukan terhadap individu-individu tertentu yang tidak menganggap dirinya sosialis dan menentang kebijakan yang dianggap tidak sosialis oleh pendukungnya.

C. Demokrasi Sosial dan Sosialisme Liberal

Demokrasi sosial adalah ideologi politik yang 'diturunkan dari tradisi sosialis dalam pemikiran politik. Banyak demokrat sosial merujuk dirinya sebagai sosialis atau sosialis demokratik, dan sebagian lainnya menggunakan istilah tersebut secara bergantian. Lainnya beranggapan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara ketiga istilah tersebut, dan memilih untuk mendeskripsikan kepercayaan politiknya hanya dengan menggunakan istilah demokrasi sosial (Nik Brandal *et. al*, 2013).

Terdapat dua varian utama, yang pertama bertujuan untuk mendirikan sosialisme demokratik, dan varian yang kedua bertujuan untuk membangun negara kesejahteraan dalam kerangka sistem kapitalis. Varian pertama secara resmi bertujuan untuk mendirikan sosialisme demokratik melalui metode reformis dan gradualis. Dalam varian kedua, Demokrasi sosial menjadi kebijakan pemerintah yang di antaranya adalah membangun negara kesejahteraan, skema perundingan bersama, dukungan terhadap pelayanan umum yang didanai publik, dan ekonomi berbasis kapitalis seperti ekonomi campuran. Varian dalam pengertian ini sering kali digunakan untuk merujuk model sosial dan kebijakan ekonomi yang ada di Eropa Barat dan Utara pada paruh akhir abad ke-20. Jerry Mander menjelaskannya sebagai ekonomi hibrida, sebuah kolaborasi aktif visi kapitalis dan sosialis, dan meski sistem tersebut tidak sempurna, mereka cenderung menyediakan standar hidup yang tinggi. Banyak penelitian dan survey menyatakan bahwa orang cenderung hidup lebih bahagia dalam masyarakat demokrasi sosial dibandingkan dengan yang neoliberal (Craig Brown, 2009).

Demokrat sosial mendukung varian pertama, menganjurkan transisi evolusioner ekonomi kapitalisme secara damai ke sosialisme melalui reformasi sosial secara progresif. Demokrat sosial menegaskan bahwa bentuk konstitusional pemerintahan yang dapat diterima adalah demokrasi perwakilan di bawah aturan hukum. Sistem ini mendorong perluasan penentuan kebijakan secara demokratis selain demokrasi politik, yaitu demokrasi ekonomi untuk menjamin pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lain atas hak kodeterminasi. Sistem ini juga mendukung ekonomi campuran yang menentang eksekutif kapitalisme seperti kesenjangan, kemiskinan, dan penindasan berbagai golongan, serta menolak pasar bebas secara total atau ekonomi terencana secara penuh. Kebijakan demokrasi

sosial yang umum di antaranya termasuk dukungan terhadap hak sosial universal untuk memperoleh pelayanan publik yang dapat diakses secara universal, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, kompensasi pekerja, dan layanan lainnya, termasuk pelayanan anak dan pelayanan untuk manula. Demokrasi sosial berhubungan dengan gerakan buruh dan mendukung hak perundingan kolektif bagi pekerja. Sebagian besar partai demokrasi sosial berafiliasi dengan Sosialis Internasional.

Sosialisme liberal adalah filsafat politik sosialis yang memasukkan prinsip liberal di dalamnya. Sosialisme liberal tidak memiliki tujuan untuk menggantikan kapitalisme dengan ekonomi sosialis; tetapi mendukung ekonomi campuran dan milik pribadi dalam barang modal. Meski sosialisme liberal secara tegas memilih ekonomi pasar campuran, sistem ini menyatakan bahwa monopoli legalistik dan buatan adalah kesalahan kapitalisme dan menentang ekonomi yang sepenuhnya tidak diatur. Sistem ini mempertimbangkan kemerdekaan dan kesetaraan agar dapat kompatibel dan bergantung satu sama lain. Prinsip yang menjelaskan sosialis liberal telah didasarkan atau dikembangkan oleh filsuf berikut ini: John Stuart Mill, Eduard Bernstein, John Dewey, Carlo Rosselli, Norberto Bobbio, dan Chantal Mouffe. Tokoh sosialis liberal penting lainnya antara lain Guido Calogero, Piero Gobetti, Leonard Trelawny Hobhouse, John Maynard Keynes, dan R. H. Tawney. Sosialisme liberal secara khusus terkenal di politik Britania dan Italia.

D. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Sosialis dan Ciri-cirinya

Otoritas suatu negara untuk menguasai semua aset masyarakat. Yang artinya regulasi seputar ekonomi serta kepemilikan harta dilakukan oleh pemerintah. Kesetaraan ekonomi. Di mana masyarakat tidak bekerja untuk kepentingan pribadi, melainkan mereka hanyalah pegawai pemerintah yang gajinya berasal dari keringat mereka sendiri. Di negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, yang mana parlemen sebagai lembaga yang berhak membuat konstitusi dan regulasi dikuasai oleh kaum proletarian atau kaum buruh. Mereka ditempatkan oleh partai-partai guna membuat regulasi yang cenderung berpihak pada kaum buruh sebagai representasi kaum sosialis.

Dalam konteks teori sosial politik, sosialisme telah digunakan untuk merujuk kepada gerakan politik, filsafat politik dan bentuk hipotetis gerkan masyarakat yang bertujuan untuk suatu pencapaian. Akibatnya, dalam konteks sosialisme politik, telah merujuk pada strategi (untuk mencapai masyarakat sosialis) atau kebijakan yang

dipromosikan oleh organisasi sosialis dan partai politik sosialis; yang semuanya tidak memiliki hubungan ke sosialisme sebagai sistem sosial ekonomi.

Di dalam sistem perekonomian sosialism memiliki beberapa prinsip dasar di mana kepemilikan harta oleh Negara Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Sehingga hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan. Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Tingkat disiplin politik. Untuk mencapai tujuan diatas, seluruh Negara diletakkan dibawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Serta beberapa aturan yang berlaku sangat ketat untuk lebih menggefektifkan praktek sosialisme. Hal ini yang menunjukkan tanpa adanya upaya yang lebih ketat mengatur kehidupan rakyat, maka keberlangsungan system sosialis ini tidak akan berlaku ideal sebagaimana dicita-citakan oleh Marx, Lenin, dan Stalin. Berdasarkan prinsip tersebut, maka ciri sistem ekonomi antara lain:

- a. Hak milik individu tidak diakui
- b. Seluruh sumber daya dikuasai negara
- c. Jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah
- d. Kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah
- e. Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat
- f. Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah

E. Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis

Kelebihan sistem ekonomi sosialis didukung dengan adanya faktor yang menjadi pendorong sistem ekonomi sosialis itu sendiri, antara lain adanya revolusi industri, adanya kaum borjuis (majikan) dan kaum proletar (buruh), munculnya pemikiran baru yang lebih rasional. Adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil Revolusi Perancis. Karl Max merupakan tokoh pengkritik kapitalisme di eropa dan penggugah perlawanan kaum buruh terhadap kapitalisme, juga penulis wacana yang menjadi dasar pembentukan sistem ekonomi sosialis. Selain faktor pendukung sistem ekonomi sosialis menunjukkan ciri-ciri yang lebih mengutamakan kebersamaan. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka. Tidak adanya pengakuan

atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis. Berkaitan dengan peran pemerintah yang sangat kuat, sehingga peran pemerintah adalah dengan bertindak aktif misalnya dengan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan, karena alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.

Sifat manusia yang ditentukan oleh pola produksi, memunculkan adanya pola produksi menghasilkan kesadaran kolektivisme atau masyarakat sosialis. Sebaliknya pola produksi menghasilkan kesadaran individualisme akan menghasilkan masyarakat kapitalis. Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan bagi setiap individu. Sehingga kreativitas masyarakat terhambat, produktivitas menurun, produksi dan perekonomian juga akan berhenti. Tidak ada insentive untuk kerja keras, karena juga tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik, prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur. Tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi, sebab Karl Marx sendiri hanya mengkritik keburukan kapitalisme, tapi tidak menjelaskan mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme. Hal ini mempertegas ciri sistem ekonomis sosialis, antara lain bahwa:

- a. Pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian. Adanya semua kegiatan dan permasalahan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah hingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya proses perekonomian.
- b. Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan terhadap barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Pemerintah mengatur distribusi, Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.
- d. Mudah dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan
- e. Pelaksanaan pembangunan lebih cepat
- f. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata, Tidak ada kesenjangan khususnya dibidang perekonomian antara si miskin dan si kaya.

F. Kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem yang seluruh kegiatan ekonominya sudah direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Sistem ekonomi sosialis ini tidak sama dengan sistem ekonomi komunis. sistem perekonomian yang memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran bersama. Sistem

ekonomi sosialis juga memiliki filosofi yakni bagaimana mendapatkan kesejahteraan, perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang dilakukan oleh Kaum Borjuis. Hal ini lah yang menjadikan Karl Marx mengkritik sistem kapitalis sebagai ekonomi yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan. Sebab, menurut Karl Marx tidak ada tempat bagi kapitalisme didalam kehidupan, maka upaya revolusioner harus dilakukan untuk menghancurkan kapitalisme, alat-alat produksi harus dikuasai oleh Negara guna melindungi rakyat. Kondisi ini menpertegas, kekurangannya, antara lain:

- a. Hak milik individu tidak diakui.
- b. Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha.
- c. Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang.
- d. Jalur birokrasi panjang.

G. Perbandingan antara Sistem Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Sosialis, serta Sistem Ekonomi Kapitalis

Krisis ekonomi yang sering terjadi dalam dunia perekonomian adalah ulah ekonomi konvensional di mana sistem ekonomi konvensional ini sistemnya lebih mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Berbeda jauh dengan ekonomi Islam atau yang sering disebut dengan ekonomi syariah di mana sistem ini menawarkan profitnya, yaitu sistem bagi hasil. Ekonomi Islam ini sangat dibutuhkan pada era milenial seperti sekarang karena ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia. Hal ini karena Islam tidak hanya kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk di muka bumi. Dalam pandangan Al-Qur'an, filsafat fundamental ekonomi Islam adalah tauhid. (Sukarno, 2013: 29).

Ekonomi Islam sendiri mempunyai dua bagian yakni, pertama bagian yang tetap (tsabit) yang berhubungan dengan prinsip ekonomi Islam yang disampaikan melalui nash-nash Al-Qur'an dan sunah. Bagian kedua ialah bagian yang berubah (*al-mutaghaiyar*), pada bagian kedua inilah yang berkaitan dengan langkah-langkah praktis yang disampaikan oleh para ulama dari sumber pokok dan prinsip ekonomi Islam yang ada dilam Al-Qur'an. (Pangiyok, 2011:15). Dalam ekonomi Islam juga dijelaskan bahwa dalam persoalan praktik ekonomi yang dinilai mengandung riba atau keuntungan yang diharamkan seperti yang sudah dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 275.

BAB IV

RAGAM SISTEM EKONOMI DUNIA

A. Sistem Ekonomi

Secara singkat, sistem ekonomi ialah sistem atau cara yang dipakai untuk mengelola semua kegiatan perekonomian di masyarakat. Setiap negara di dunia ini menggunakan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi di negara tersebut, baik secara ekonomi, politik, ideologi, dan keadaan alam. Seperti halnya di negara kita, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi di Indonesia belum tentu dapat diterapkan di negara lain, dan begitu juga sebaliknya. Namun yang pasti penerapan suatu sistem ekonomi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara sehingga dapat mengakomodasi pertanyaan pokok dalam ekonomi, yaitu: a) *What* (apa dan berapa banyak barang produksi); b) *How* (bagaimana cara memproduksi); c) *For Whom* (untuk siapa barang diproduksi).

Menurut Gilarsu (2000), sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis sehingga kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Sementara Gregory Grossman & M. Manu, (2000), menyatakan sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga saling menopang dan

memengaruhi. Sedangkan McEachern, (2000), menyatakan sistem ekonomi sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (*what, how, dan for whom*).

Sistem ekonomi merupakan cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada negaranya. Kenali lebih dalam tentang pengertian sistem ekonomi, fungsi, dan macamnya. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (*planned economies*) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (*market economic*), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

Sistem ekonomi berfungsi sebagai penyedia dorongan untuk memproduksi, juga berfungsi dalam mengoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Disamping sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan, sistem ekonomi juga dapat menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Dalam sistem ekonomi ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan Republik Rakyat Cina/RRC yang

menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. China, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.

Seperti yang telah disebutkan di atas, timbulnya berbagai macam sistem ekonomi di dunia ini, terjadi karena adanya perbedaan situasi dan kondisi masing-masing negara serta pilihan politik para pendirinya. Jadi, sistem ekonomi di suatu negara itu tergantung pada kondisi negara yang bersangkutan. Adapun macam-macam sistem ekonomi di dunia sebagai berikut.

B. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat masyarakat secara turun temurun di mana faktor ekonominya sangat terbatas.

1. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Tradisional:
 - a. Belum mengenal uang dan proses transaksi masih menggunakan sistem barter.
 - b. Tidak ada pembagian kerja.
 - c. Jenis produksi masih berdasarkan kebutuhan.
 - d. Hubungan masyarakat masih bersifat kekeluargaan.
 - e. Masih bertumpu pada sektor agraris.
 - f. Keadannya masyarakatnya tradisional dan cenderung miskin.
2. Kelebihan Sistem Ekonomi Tradisional
 - a. Semua anggota masyarakat masih memiliki motivasi untuk menjadi produsen.
 - b. Kegiatan produksi berlangsung untuk memenuhi kebutuhan, tidak untuk mencari keuntungan.
 - c. Masyarakatnya cenderung jujur dalam kegiatan pertukaran karena masih menggunakan sistem barter (tukar menukar barang).
3. Kekurangan Sistem Ekonomi Tradisional
 - a. Belum ada kerja sama yang baik di masyarakatnya.
 - b. Sulitnya dalam penentuan nilai barang yang dipertukarkan.
 - c. Jenis dan jumlah barang yang dihasilkan seringkali tidak bisa melayani kebutuhan.
 - d. Sulitnya mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan untuk aktivitas perekonomian.

C. Sistem Ekonomi Komando (Terpusat)

Sistem ekonomi Komando atau Terpusat (sosialis) adalah sistem perekonomian yang menempatkan pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Penerapan sistem ekonomi sosialis penguasaan adalah dengan membatasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

1. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Terpusat
 - a. Pemerintah memiliki kekuasaan dominan terhadap pengaturan kegiatan perekonomian.
 - b. Negara tidak mengakui hak milik perorangan, kecuali yang sudah dibagikan.
 - c. Segala sumber daya dan peralatan produksi adalah milik negara.
 - d. Pemerintah berkuasa dalam pembagian kerja sehingga tidak ada kebebasan dalam berusaha bagi individu.
 - e. Pemerintah menentukan harga-harga.
2. Kelebihan Sistem Ekonomi Terpusat
 - a. Semua aktivitas ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.
 - b. Segala aktivitas perekonomian lebih mudah dikendalikan dan diawasi.
 - c. Mencegah terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat.
3. Kekurangan Sistem Ekonomi Terpusat
 - a. Segala potensi, kreativitas, dan inisiatif masyarakat tidak bisa berkembang.
 - b. Hak milik perorangan tidak diakui oleh negara.
 - c. Individu tidak memiliki kebebasan untuk memiliki usaha sendiri.
 - d. Kualitas suatu pemerintah menjadi penentu keberhasilan sistem ekonomi sosial.

D. Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal atau kapitalis adalah bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada setiap orang dalam kegiatan perekonomian tanpa dicampuri oleh pemerintah.

1. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Liberal
 - a. Setiap orang dapat memiliki hak atas alat produksi dan bebas melakukan kegiatan perekonomian.
 - b. Harga-harga barang di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran.
 - c. Terjadi persaingan bebas antar pelaku ekonomi.

BAB V

SEJARAH EKONOMI ISLAM (SYARIAH)

A. Perekonomian Arab Pra-Islam

Sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern, ilmu ekonomi Islam memang baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi, benarkah pemikiran tentang ekonomi Islam juga merupakan fenomena baru pada abad 20? Ternyata tidak! Pemikiran tentang ekonomi Islam ternyata telah muncul sejak lebih dari seribu tahun lalu, bahkan sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Pemikiran ekonomi di kalangan pemikir muslim banyak mengisi khazanah pemikiran ekonomi dunia, pada masa di mana Barat masih dalam kegelapan (*the dark middle age*). Pada masa tersebut dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang.

Pada masa Arab pra-Islam atau yang sering disebut masa jahiliyah sudah biasa melakukan transaksi berbau riba'. Ath-Thabari menyatakan: 'Pada masa jahiliyah, praktik riba terletak pada penggandaan dan kelebihan jumlah umur satu tahun. Misalnya, seorang berutang. Ketika sudah jatuh tempo, datanglah pemberi utang untuk menagihnya seraya berkata, 'Engkau akan membayar utangmu ataukah akan memberikan tambahan (bunga) nya saja kepadaku? Jika ia memiliki sesuatu yang dapat ia bayarkan maka ia pun membayarnya. Jika tidak, maka ia akan menyempurnakannya hingga satu tahun ke depan. Jika utangnya berupa *ibnatu makhadh* (anak unta yang berumur satu tahun), maka pembayarannya menjadi *ibnatu labun* (anak unta yang berumur 2 (dua) tahun) pada tahun

kedua. Kemudian ia akan menjadikannya *hiqqah* (anak unta yang berumur 3 (tiga) tahun), kemudian menjadikannya *jadzah* (unta dewasa). Selanjutnya kelipatan 4 (empat) ke atas.' Juga dalam hal utang emas ataupun uang, berlaku *riba'*.

Sebagai pelaku ekspor impor, jazirah Arab memiliki pusat kota tempat bertransaksi yaitu Kota Makkah. Kota Makkah merupakan Kota Suci yang setiap tahunnya dikunjungi, terutama karena disitulah terdapat bangunan suci Ka'bah. Selain itu di Ukaz terdapat pasar sebagai tempat bertransaksi dari berbagai belahan dunia dan tempat berlangsungnya perlombaan kebudayaan (puisi Arab). Oleh karena itu kota tersebut menjadi pusat peradaban baik politik, ekonomi, dan budaya yang penting. Makkah merupakan jalur persilangan ekonomi internasional, yaitu menghubungkan Makkah ke Abyssinia seterusnya menuju ke Afrika Tengah. Dari Makkah ke Damaskus seterusnya ke daratan Eropa. Dari Makkah ke *al-Machin* (Persia) ke Kabul, Kashmir, Singking (Sinjian) sampai ke Zaitun dan Canton, selanjutnya menembus daerah Melayu. Selain itu juga dari Makkah ke Aden melalut laut menuju ke India, Nusantara, hingga Canton (*al-Haddad*). Hal ini menyebabkan masyarakat Makkah memiliki peran strategis untuk berpartisipasi dalam dunia perekonomian tersebut. Mereka digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu para konglomerat yang memiliki modal, kedua, para pedagang yang mengolah modal dan' para konglomerat, dan ketiga, para perampok dan rakyat biasa yang memberikan jaminan keamanan kepada para khafilah pedagang dari perantuan, mereka mendapatkan laba keuntungan sebesar sepuluh persen.

Para pedagang tersebut menjual komoditas itu kepada para konglomerat, pejabat, tentara, dan keluarga penguasa, karena komoditas tersebut mahal, terutama barang-barang impor yang harus dikenai pajak yang sangat tinggi. Alat pembayaran yang mereka gunakan adalah koin yang terbuat dari perak, emas atau logam mula lain, yang ditiru dari mata uang Persia dan Romawi. Sampai sekarang koin tersebut masih tersimpan di sejumlah Museum di Timur Tengah. Dari berbagai sumber sejarah diketahui bahwa mata uang pada masa jahiliah dan pada masa permulaan Islam, terdiri, dari 2 (dua) macam: dinar dan dirham. Mata uang dirham terbuat dari perak, terdiri dari tiga jenis: *Bughliyah*, *Jaraqiyah*, dan *Thabariyah*. Ukurannya beragam. *Bughliyah* beratnya 4,66 gram, *Jaraqiyah* beratnya 3,40 gram, dan *Thabariyah* beratnya 2,83 gram. Sedangkan mata uang dinar terbuat dari emas. Pada masa jahiliah dan pada permulaan Islam, Syam dan Hijaz menggunakan mata uang Dinar yang seluruhnya adalah mata uang Romawi. Mata uang ini

dibuat di negeri Romawi, berukiran gambar raja, bertuliskan huruf Romawi. Satu dinar pada masa itu setara dengan 10 dirham.

B. Perekonomian Islam Masa Kenabian (571–632)

Pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah). Rasulullah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqh*), politik (*siyasah*), juga masalah perniagaan atau ekonomi (*muamalah*). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, 'kemiskinan membawa orang kepada kekafiran'. Maka upaya mengantas kemiskinan merupakan dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah. Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut menjadi pedoman oleh para penggantinya Abu Bakar, Umar Bin Khatab, Utsman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Qur'an dan al-Hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata perekonomian Negara.

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang tumbuh dan menjadi gerakan perekonomian Islam sejak seperempat abad yang lalu. Dalam ranah keilmuan ekonomi Islam bukan hal yang baru namun sempat mengalami kemunduran seiring peradaban dunia sehingga bidang-bidang kajian keilmuan ekonom Islam masih sangat luas dan untuk memudahkan tentu saja bidang kajian hampir sama dengan apa yang ada dalam ekonomi konvensional (Farida, 2012). Kemunduran ekonomi Islam tersebut sejujurnya patut disayangkan mengingat ilmu ekonomi Islam itu sendiri sebetulnya respon para cendekiawan Muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Ini berarti pemikiran ekonomi Islam sama tuanya dengan Islam itu sendiri (Soemitra, 2008).

Ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk realisasi visi agama Islam yaitu sebagai agama yang mengusung fungsinya sebagai rahmatan lil'alamin, agama kebaikan dan kesejahteraan. Ekonomi Islam yang berlandaskan kepada tauhid menekankan bahwa segala sesuatu hanyalah milik sang Pencipta sehingga unsur keserakahan tidak terpupuk dan memengaruhi perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi. Ekonomi Islam sendiri telah ada sejak Islam bermula. Melalui praktik sosial yang dicontohkan oleh Muhammad SAW selaku pengemban risalah Islam, setiap muslim dapat melihat gambaran bagaimana Islam memberikan tuntunan mengenai interaksi antar sesama manusia.

Beberapa ilmuwan juga memberikan definisi yang berbeda mengenai ekonomi Islam. Menurut Manan, 1997, definisi ekonomi Islam adalah suatu studi sosial yang mempelajari masalah ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai dasar. Sedangkan menurut Naqvi, 1981, ekonom Islam adalah representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu, sehingga ekonomi Islam dapat diartikan sebagai kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah serta hasil ijtihad ulama.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1270-an, tetapi perlu diketahui bahwa pemikiran ekonomi Islam telah muncul sejak Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits maka pemikiran ekonomi Islam juga tentu munculnya bersamaan dengan diturunkannya Al-Qur'an dan masa kehidupan Rasulullah saw. Pada akhir abad VI M hingga awal abad VII M. Setelah masa tersebut banyak sarjana muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi.

Pemikiran tentang ekonomi Islam ternyata telah muncul sejak lebih dari seribu tahun lalu, bahkan sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Pemikiran ekonomi di kalangan pemikir muslim banyak mengisi khazanah pemikiran ekonomi dunia, pada masa di mana Barat masih klaim kegelapan (*dark age*). Pada masa tersebut dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang. Pada masa Arab pra-Islam atau yang sering disebut masa jahiliyah sudah biasa melakukan transaksi berbau *riba'*. Ath-Thabari menyatakan, 'Pada masa jahiliyah, praktik *riba'* terletak pada penggandaan dan kelebihan jumlah umur satu tahun'. Misalnya, seseorang berutang, ketika sudah jatuh tempo, datanglah pemberi utang untuk menagihnya seraya berkata, 'Engkau akan membayar utangmu atukah akan memberikan tambahan bunganya saja kepadaku? Jika ia memiliki sesuatu yang dapat ia bayarkan maka ia pun membayarnya. Jika tidak, maka ia akan menyempurnakannya hingga satu tahun ke depan. Jika utangnya berupa *ibnatu makhadh* (anak unta yang berumur satu tahun), maka pembayarannya menjadi *ibnatu labun* (anak unta yang berumur dua tahun) pada tahun kedua. Kemudian ia akan menjadikannya *hiqqah* (anak unta yang berumur 3 tahun, kemudian menjadikannya *jadzah* (unta dewasa). Selanjutnya kelipatan 4 (empat) ke atas. Juga dalam hal utang emas ataupun uang, berlaku *riba'*.

Siregar (2001), dijelaskan mengenai perjalanan ekonomi Islam dari masa yang paling awal dapat dibagi menjadi 4 (empat) fase sebagai berikut.

- 1) Fase pertama merupakan fase abad awal sampai abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dikembangkan oleh fuhaqa, sufi dan filsuf. Pada fase ini dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadis, mereka mengeksplorasi mengenai masalah (*utility*) dan mafsadah (*dis-utility*). Dengan kata lain fase ini mengkaji apa hal-hal yang dibolehkan dan apa yang diharamkan termasuk dalam aktivitas mu'amalah. Fase ini belum dibicarakan bagaimana seharusnya kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh umat.
- 2) Fase kedua timbul mulai dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi dikenal sebagai fase yang cukup cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya di mana para scholars mampu menyusun bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonominya yang seharusnya sebagaimana diinspirasi oleh Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai contoh pada fase ini muncul Al-Ghazali tahun 1055-1111 Masehi yang pembahasannya terfokus pada perilaku individu dengan mengacu Al-Qur'an dan Hadis.
- 3) Fase ketiga yang dimulai pada tahun 1446-1932 Masehi merupakan fase di mana *fuhaqa* hanya mengulang-ngulang apa yang telah ditulis oleh pendahulunya saja sehingga pemikiran yang cemerlang tidak terlahir pada fase ini. Mereka melihat ekonomi Islam sebagai doktrin yang harus diikuti tanpa reserve. Era inilah yang disebut dalam sejarah pemikiran fiqih sebagai era *taqlid (stagnasi)*. Pada era ini berkembang isu yang disebut dengan tertutupnya pintu ijtihad. Ijtihad tidak lagi diperkenankan, tidak saja disebabkan tidak adanya ahli yang memiliki kapasitas tertentu, tetapi juga disebabkan oleh anggapan seluruh masalah-masalah yang muncul sudah ada jawabannya seperti yang terdapat dalam kitab imam-imam mazhab.
- 4) Fase keempat dimulai dari tahun 1932 hingga sekarang. Fase ini disebut dengan fase implementasi ekonomi Islam secara sistematis dan modern yang tercermin dari beberapa tulisan mereka bagaimana mengimplementasikan ekonomi menjadi suatu realitas yang diaplikasikan.

Sedangkan menurut Matta (1997), tahapan perkembangan ekonomi Islam modern terhadap perjalanan ekonomi Islam itu sendiri antara lain, adalah

- a) Pertama tahap komparasi yaitu kajian-kajian ekonomi Islam dengan melakukan perbandingan-perbandingan antara ajaran Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Beberapa pemikir pada tahap ini menunjukkan adanya suatu penolakan terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Satu hal yang

BAB VI

EKONOMI ISLAM

MASA KHULAFUR RASYIDIN

Terminologi pemikiran Ekonomi Islam pada intinya mengandung dua pengertian, yaitu pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh para Sarjana Muslim dan pemikiran ekonomi yang didasarkan atas Agama Islam. Dalam realitanya kedua pengertian ini sering kali menjadi kesatuan, sebab para Sarjana Muslim memang menggali pemikirannya berdasarkan pada ajaran Islam. Sumber utama pemikiran ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Al-Qur'an dan Al-hadits sendiri adalah dasar dan sumber syari'at Islam. Oleh karena itu, sejarah pemikiran ekonomi Islam sesungguhnya telah ada sejak Al-Qur'an dan Al-hadits ada, yaitu pada masa kehidupan Rasulullah saw. Abad ke-7 Masehi. Para sarjana pasca Rasulullah banyak membaca karya-karya pemikir Yunani-Romawi, sebagaimana juga karya *'Syrian-Alexandrian, Zoroastrian, dan India*. Tapi para Sarjana Muslim ini tidak menjiplak tulisan-tulisan pemikir Yunani-Romawi ini melainkan memperdalam, mengembangkan, memperkaya dan memodifikasinya sesuai dengan ajaran Islam.

Ekonomi Islam bukan lagi menjadi kata yang asing di zaman sekarang, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam..Seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip aturan Islam dan sama sekali tidak bertentangan dengan syariat

Islam. Perkembangan ekonomi Islam saat ini adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi dan misi agama Islam itu sendiri tentang Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, kebaikan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi alam semesta dan seluruh makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia. Tidak ada penindasan antara pekerja dan pemilik modal, tidak ada perusakan sumber daya alam yang menyebabkan ekosistem alam rusak, tidak ada hasil produksi yang semata-mata hanya untuk meraup keuntungan, tidak ada jurang kemiskinan yang terlalu dalam, tidak ada konsumsi yang berlebihan (*mubadzir*), tidak ada korupsi, tidak ada penipuan dalam bentuk apapun maupun dalam muamalah lainnya. Jika kondisinya seperti itu, maka kehidupan manusia di muka bumi ini akan terjalin secara harmoni, tentram, damai dan selalu mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat in syaa Allah.

Ekonomi Islam yang sudah kita rasakan hingga detik ini baik teori maupun praktik adalah suatu hasil nyata dari upaya operasionalisasi tentang bagaimana caranya untuk mewujudkan visi menjadi misi agar dapat terealisasikan di kehidupan nyata ini, walaupun kenyataannya yang kita rasakan hingga saat ini bukan merupakan sebuah visi yang ideal. Perkembangan ekonomi Islam adalah salah satu harapan untuk mewujudkan visi dan misi Islam tersebut, hal ini karena ekonomi Islam adalah satu bentuk integral dalam mewadahi dua kekuatan besar yang memengaruhi kehidupan dunia, yaitu agama dan ekonomi. Dua komponen itulah yang nantinya akan kita wujudkan untuk mempersatukan umat Islam saat ini. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak bisa di pisahkan dalam kehidupan manusia. Aktifitas inipun sudah di mulai sejak zaman Nabi Adam hingga saat ini, meskipun dari zaman ke zaman mengalami perkembangan. Setiap masa manusia mencari cara mengembangkan proses ekonomi itu sesuai dengan tuntutan kebutuhannya.

Islam yang awal kejayaannya di masa Rasulullah SAW juga memiliki konsep sistem ekonomi yang patut di jadikan bahan acuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada saat ini, terlepas dari itu kita masih punya empat sosok luar biasa penerus kepemimpinan setelah Rasulullah yang merupakan sahabat Rasulullah sendiri yang sering di sebut dengan Khulafaur Rasyidin. Kita semua tentu mengenal empat sosok sahabat Rasulullah mereka adalah para *Khulafaur Rasyidin* yang memimpin selama kurang lebih 29 tahun lamanya yang jasanya baik berupa kebijakan atupun lainnya juga dapat kita jadikan bahan acuan dalam menetapkan berbagai kebijakan ekonomi maupun permasalahan ekonomi yang terjadi pada saat ini. Empat sahabat itu adalah Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar

bin Khattab, Usaman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Berikut ini ulasan satu persatu kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh para Khulafaur Rasyidin.

A. Periode Abu Bakar Ash-Shidiq (11–13 H/631–633 M)

Para periode ini banyak sahabat yang pernah hidup bersama Rasulullah saw. dan para tabi'in sehingga dapat memperoleh referensi ajaran Islam yang autentik.

Abu Bakar memerintah hanya dua tahun walaupun pada masanya banyak masalah yang terjadi di antaranya banyaknya orang yang murtad, orang yang tidak mau membayar zakat dan terjadinya perang Riddah, namun Abu Bakar As-Shidiq mampu mengatasinya dengan baik. Dalam pemerintahannya Khalifah Abu Bakar memenuhi kebutuhan rakyatnya dari harta yang tersedia di dalam baitul maal. Kebijakan ekonomi yang di ambil Abu Bakar adalah

- a. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat
- b. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian penghitungan zakat
- c. Dalam mendistribusikan harta *Baitul Maal* Abu Bakar memiliki prinsip kesamarataan
- d. Mengambil alih tanah dari orang-orang murtad dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam
- e. Menetapkan kebijakan tanah hasil penaklukan dengan membagi sebagian untuk umat muslim dan sebagian untuk negara
- f. Tidak pernah menumpuk harta *baitul maal* dalam jangka waktu panjang.

B. Periode Umar bin Khattab (13–23 H/634–644 M)

Pemikiran ekonomi pada masa ini dilatarbelakangi oleh menjamurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan antara golongan miskin dan kaya, meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada pada taraf kemakmuran. Banyak pemikir-pemikir besar yang karyanya dijadikan rujukan sampai saat ini, yaitu Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Al-Maghrizi, Abu Ishaq Al-Syatibi, Abdul Qadir Jaelani, Ibnul Qoyyim, Ibnu Tufayl dan Ibnu Ruysd.

Umar ibn Khattab memerintah selama 10 tahun, namun dalam kurun waktu tersebut banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab inilah bisa disebut sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan itulah yang menyebabkan berjayanya ekonomi Islam

pada saat itu. Kebijakan Ekonomi yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab diantaranya adalah:

- a. Mendirikan *Baitul Maal* pada tahun 16 H.
- b. Menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta *Baitul Maal*.
- c. Dalam kepemilikan tanah, ia tidak membagikan kepada kaum muslim tetapi membiarkannya dengan syarat akan membayar *kharaj/jizyah* dan berhak mengambil kembali tanah tersebut jika tidak di manfaatkan.
- d. Mengklasifikasikan alokasi pendapatan negara yang berupa zakat, *'usyr*, *khums*, shadaqah, *kharaj*, dan lain-lain kepada penerima yang telah di tentukan.

C. Periode Utsman bin Affan (23-35H/644-656M)

Dalam periode ketiga ini kejayaan pemikiran, dan juga dalam bidang lainnya, dari umat Islam sebenarnya telah mengalami penurunan. Namun demikian, terdapat beberapa pemikiran ekonomi yang berbobot selama dua ratus tahun terakhir, seperti karya-karya dari Shah Waliullah, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani dan masih banyak lagi.

Utsman bin Affan yang memimpin selama 12 tahun ini merupakan masa pemerintahan terlama. Namun, tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama masa pemerintahannya. Khalifah Utsman hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab. Satu hal yang luar biasa dari beliau bahwa ia selalu mendiskusikan masalah perekonomian setelah salat berjamaah. Kebijakan Ekonomi yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan di antaranya

- a. Mempertahankan sistem pemberian santunan serta memberikan tambahan jumlah uang dengan jumlah yang berbeda-beda.
- b. Dalam hal pengelolaan zakat ia mendelegasiakan kewenangan menaksir jumlah zakat kepada para pemiliknya masing-masing.
- c. Membagikan tanah-tanah negara kepada individu-individu dengan tujuan reklamasi.
- d. Khalifah Utsman bin Affan selalu mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlangsung setelah salat berjamaah.

D. Periode Ali bin Abi Thalib (35–40 H/656–661 M)

Ali bin Abi Thalib memimpin selama 5 tahun ia menempatkan kembali kondisi *Baitul Maal* di posisi sebelumnya. Khalifah Ali pun mengatur kembali tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat serta memindahkan pemerintahan dari Kuffah ke Madinah. Kebijakan ekonomi yang diambil pada masa kepemimpinannya adalah

- a. Memberhentikan para pejabat yang korup.
- b. Membuka kembali lahan yang telah diberikan kepada individu atau orang terdekat Utsman untuk dimanfaatkan kembali lalu didistribusikan kepada masyarakat.
- c. Menetapkan satu hari khusus untuk pembayaran zakat dan pendistribusian harta *Baitul Maal*.
- d. Membentuk polisi yang terorganisir yang bernama Syurtah.

Masa *Khulafaur Rasyidin* yang dipimpin oleh empat sosok sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah setelah Beliau wafat merupakan suatu teladan yang luar biasa yang dapat dijadikan suatu *role model* ekonomi Islam. Banyak keteladan yang dapat kita ambil dari semua kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh keempat Khulafaur Rasyidin tersebut dan dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita khususnya dalam masalah kegiatan ekonomi. Kita sebagai umat Islam yang baik harus mendukung penuh sistem ekonomi Islam itu sendiri agar kelak visi dan misi yang kita harapkan tercapai yaitu bersatunya umat Islam dengan berlandaskan dua kekuatan yang sangat memengaruhi dunia saat ini yaitu agama dan ekonomi untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang tersistematik seperti yang telah dicontohkan oleh empat sosok Khulafaur Rasyidin.

BAB VII

EKONOMI ISLAM

PASCA-KHULAFUR RASYIDIN

Pada era tahun 1930-an Masehi merupakan masa kebangkitan kembali intelektualitas di dunia Islam. Kemerdekaan negara-negara muslim dari kolonialisme barat mendorong semangat para sarjana muslim dalam mengembangkan pemikirannya. Khurshid (1984: 9-11), membagi perkembangan ekonomi Islam kontemporer menjadi 4 fase. Pada awalnya, perkembangan ini diawali oleh kiprah para ulama yang kebanyakan tidak didukung, pengetahuan ekonomi yang memadai dalam menyoroti berbagai persoalan sosial ekonomi saat itu dari perspektif Islam. Hal ini tentu saja memicu minat para ekonom muslim untuk mengembangkan lebih lanjut aspek-aspek tertentu perekonomian, kemudian diikuti dengan pendirian institusi ekonomi berbasis syariat Islam. Saat ini, upaya untuk membangun teori ekonomi Islam ke dalam bangunan ilmu yang integral yang telah dilakukan.

A. Masa Dinasti Bani Umayyah

Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah ibn Abu Sufyan ibn Harb. Terbentuknya dinasti ini dan diakuinya secara resmi ketika Muawiyah memangku jabatan khalifah padatahun 661 M/41 H. Muawiyah mendapatkan kursi kekhalifahan setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib berdamai dengannya pada tahun 41 H. Umat Islam sebagian membaiaat Hasan setelah ayahnya wafat. Namun, Hasan

menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan umat kepada Muawiyah sehingga tahun itu dinamakan *'umul jama'ah* atau tahun persatuan.

Dalam perkembangan sejarah pemerintahan Dinasti Bani Umayyah, para sejarawan membagi kekuasaan pemerintahan Dinasti Bani Umayyah menjadi 2 periode, yaitu periode pertama, Umayyah I: dari tahun 41-133 H/661-750 M, pusat pemerintahan berada di Damaskus. periode kedua, Umayyah II: dari tahun 139- 423 H/756-1031 dengan pusat pemerintahan berpindah ke Kordoba Spanyol. Dengan terbunuhnya Marwan Ibn Malik, berakhirlah Dinasti Umayyah di Syiria dengan Damaskus sebagai Ibu Kotanya. Akan tetapi, Abd al-Rahman Ibn Mu'awiyah pada saat revolusi Abasiah, berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di Andalusia. Ia adalah pangeran Bani Umayyah pertama yang masuk ke Andalusia (Spanyol). Oleh karena itu, ia digelar *al-Dakhil (Abd al-Rahman al-Dakhil)*. *Abd al-Rahman al-Dakhil* berhasil menjatuhkan *Abd al-Rahman al-Fihri* Gubernur Andalusia yang tunduk pada Dinasti Abasiah pada tahun 756 M. (138 M.). Mulai tahun 757, berdirilah Dinasti Umayyah di Andalusia tanpa gelar Khalifah; *Abd al-Rahman al-Dakhil* bergelar Amr (bukan Khalifah).

Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi *monarchiheriditis* (kerajaan turun temurun). Suksesnya kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya yang bernama Yazid. maksudnya dari Muawiyah yaitu ingin mencontoh monarki di Persia dan Bizantium.

Adapun urutan khalifah pada masa dinasti Umayyah adalah sebagai berikut: Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan (661-679 M), Khalifah Yazid I bin Muawiyah (679-683 M), Khalifah Muawiyah II bin Yazid (683-684 M), Khalifah Marwan I bin al-Hakam (683-684 M), Khalifah Abdul Malik bin Marwan (684-705 M), Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik (705-714 M), Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik (715-717 M), Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-719 M), Khalifah Yazid II (720-724 M), Khalifah Hisham bin Abdul Malik (723-742 M), Khalifah Al-Walid II bin Yazid II (742-743 M), Khalifah Yazid III dan Ibrahim bin Al Walid II (743-744 M), Khalifah Marwan II bin Muhammad (744-750 M).

Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah, dapat dilihat pada gambaran perkembangan ekonomi baik berupa kebijakan maupun pemikiran pada masa dinasti Umayyah diantaranya terlihat dari kepemimpinan beberapa Khalifah termasyhur yang berhasil menorehkan perhatian besar pada

pembangunan negara dan bertujuan menciptakan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu terdapat beberapa sumbangsih dari para ulama dan Fuqaha di masa dinasti Umayyah. Penjabaran kebijakan, sumbangsih dan peran dari Khalifah serta Ulama Fuqaha akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Periode Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan (661–679 M)

Pada masa pemerintahan Mu'awiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman surat melalui pos (*al-barid*) serta seluruh fasilitas pendukungnya. Beliau juga menertibkan angkatan perang dengan melakukan perekrutan tentara-tentara secara profesional dan menghapus sistem militer yang tradisional yang didasarkan atas organisasi kesukuan, mencetak mata uang, mengembangkan jabatan *qadi* (hakim) sebagai jabatan profesional. Para *qadi* di masaitu dalam memutuskan suatu perkara tidak terpengaruh oleh kebijakan politik atau kekuasaan pemimpin negara sehingga mereka bebas memutuskan sesuatu termasuk dalam urusan yang berkaitan dengan para pejabat tinggi negara. Kebijakan lain adalah pemberian gaji tetap kepada tentara, membangun armada laut yang kuat, serta pengembangan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik.

Sistem lainnya yang Mu'awiyah bangun adalah membentuk lima macam kepaniteraan yakni kepaniteraan urusan korespondensi (surat menyurat), kepaniteraan urusan pajak, kepaniteraan urusan angkatan bersenjata atau tentara, kepaniteraan urusan kepolisian, dan kepaniteraan urusan peradilan yang berkaitan dengan jabatan *qadi*. Masing-masing kepaniteraan dipimpin oleh seorang panitera. Dalam hal kebijakan pajak, Khalifah Mu'awiyah menarik kurang lebih sekitar 2,5% dari pendapatan tahunan kaum muslimin. Nilai pajak ini sama halnya dengan nilai pajak penghasilan di era modern saat ini. Muawiyah juga mengembangkan militernya demi memperkuat daulah dan berfungsi sebagai pembuka *futukhat* daerah jajahan, bahkan salah satu kebijakannya mewajibkan bagi rakyatnya wajib militer. Keuangan negara masih sistem *Baitul Maal* yang pemasukannya dari pajak, zakat, *fai'*, *diyat*, dan *kharraj*.

Pada masa Mu'awiyah, ia juga mampu membangun sebuah struktur masyarakat muslim yang tertata rapi yang salah satunya ditandai oleh kerukunan beragama yang sangat tinggi bahkan Khalifah sendiri mengangkat beberapa orang Kristen untuk menduduki jabatan penting kerajaan yang sebelumnya tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin. Dengan pembangunan struktur masyarakat yang lebih rapi, geliat perekonomian pada masa itu sudah semakin berkembang dan maju.

2. Periode Khalifah Abdul Malik bin Marwan (684–705 M)

Pemikiran yang serius terhadap penertiban dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa pemerintahan khalifah Abdul Malik bin Marwan. Hal ini dilatarbelakangi oleh permintaan pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapus kalimat *Bismillahirrohmaanirrohiim* dari mata uang yang berlaku pada khilafahnya. Pada saat itu, bangsa Romawi mengimpor dinar Islam dari Mesir. Akan tetapi, permintaan tersebut ditolaknya. Bahkan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak mata uang Islam tersendiri dengan tetap mencantumkan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* pada tahun 74 H (659 M) dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam seraya melarang pemakaian melakukan percetakan mata uang lain. Ia juga menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada mereka yang melakukan percetakan mata uang di luar percetakan Negara. Selain itu ia juga melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Realisasinya dapat kita lihat dari hasil penerimaan pajak (*kharaj*) di wilayah Syam saja, tercatat 1.730.000 dinar emas setahun.

3. Periode Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (71–719 M)

Ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi *Baitul Maal* berubah. Al Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya *Baitul Maal* dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT. dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah *Baitul Maal* berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Keadaan di atas berlangsung sampai datangnya Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz (memerintah 717–720 M). Umar berupaya untuk membersihkan *Baitul Maal* dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Di samping itu, Umar sendiri mengembalikan milik pribadinya sendiri, yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun, ke *Baitul Maal*.

Kesejahteraan rakyat di masa Umayyah betul-betul terjamin. Cerita tentang harta zakat yang tidak terdistribusikan karena tidak

adanya fakir miskin yang berhak menerima kembali terulang. Yahya bin Said, seorang petugas zakat pada waktu itu berkata, ia pernah diutus oleh Khalifah Umar bin Abdul Azis untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, ia bermaksud untuk membagikannya kepada fakir miskin. Namun, ia tidak menemukan seorang pun. Umar bin Abdul Azis telah menjadikan semua rakyatnya hidup dalam kecukupan ekonomi. Akhirnya ia memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya.

Dalam melakukan berbagai kebijakan pemerintahannya, Khalifah Umar bin Abdul Azis bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum muslimin, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan para musfir dan menyantuni fakir miskin. Salah satu bukti kesungguhan dalam menegakkan keadilan, Khalifah Umar bin Abdul Azis pernah membelanjakan seluruh kekayaan *Baitul Maal* di Irak untuk membayar ganti rugi kepada orang-orang yang diperlakukan semena-mena oleh para penguasa sebelumnya. Karena tidak mencukupi, ia mengambil dari kekayaan *Baitul Maal* di Syam. Khalifah Umar bin Abdul Azis juga menetapkan bahwa para pejabat diberi gaji sebesar 300 dinar dan dilarang melakukan berbagai pekerjaan sampingan. Selain itu, pajak yang dikenakan oleh non muslim hanya berlaku pada 3 (tiga) profesi, yaitu pedagang, petani, dan tuan tanah.

Di bidang pertanian, Khalifah Umar melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan. Ia memerintahkan Amirnya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang ada. Bila terjadi sewa menyewa maka yang diterapkan adalah prinsip keadilan dan kemurahan hati. Beliau melarang pemungutan sewa untuk lahan yang tidak subur dan bilapun lahannya subur maka uang sewa yang diminta harus memerhatikan faktor keadilan sesuai dengan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan.

Lebih jauh, Khalifah Umar menerapkan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan yang diberlakukan yaitu setiap wilayah Islam memiliki kewenangan untuk mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri serta tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah yang minim pendapatan zakat dan pajaknya. Dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokok. Beliau menjamin hak warisan

seseorang dan menjamin hak kebebasan tidak mempedulikan rakyatnya itu muslim ataupun non muslim. Jika terdapat kelebihan harta setelah dibagikan kepada kaum muslimin selanjutnya harta *Baitul Maal* akan diberikan kepada orang-orang Dzimmi.

Kaum *Dzimmi* juga diberikan hak berupa peminjaman lahan pertanian sebagai tempat mereka untuk mencari penghidupan. Pada masa-masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, *ghanimah* atau harta rampasan perang, pajak penghasilan pertanian (diterapkan setelah khalifah berkuasa beberapa saat karena di awal pemerintahannya situasi kondisi perekonomian belum kondusif setelah kekuasaan Khalifah sebelumnya), dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat pada masa Khalifah Umar ternyata hanya bertahan selama tiga tahun karena Umar wafat pada usia 35 tahun. Setelah Khalifah Umar digantikan oleh Yazid ibn Abdul Malik kekacauan kehidupan masyarakat timbul kembali, terutama karena penguasa lebih menyukai bergelimang dengan harta kekayaan dan kekuasaan.

B. Pemikiran Ekonomi Islam dari para Ulama

Selain pemikiran dan kebijakan yang dihasilkan Khalifah selama berkuasa, pada masa Daulah Umayyah juga ditemukan banyak pemikir-pemikir ekonomi yang berasal dari kalangan ulama, fuqahah, bahkan filsuf. Para tokoh dengan pemikiran yang mereka hasilkan di antaranya sebagai berikut.

a. Zaid Ibn Ali (699–738 M)

Zaid bin Ali merupakan cucu dari Imam Husein r.a. dan seorang ahli Fiqh yang terkenal di Madinah yang merupakan guru dari ulama terkemuka, Imam Abu Hanifah. Zaid bin Ali berpandangan bahwa penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridhoantara kedua belah pihak. Hal ini dapat dibenarkan karena beberapa hal.

- 1) Penjualan dengan sistem kredit termasuk bentuk transaksi yang sah dan dibenarkan selama dilakukan dengan kesepakatan kedua pihak.
- 2) Keuntungan dari penjualan kredit ini adalah bentuk murni dari suatu perniagaan dan bukan termasuk *riba'*.
- 3) Penjualan yang dilakukan secara kredit adalah salah satu bentuk promosi dan respons terhadap pasar sehingga keuntungan yang diperoleh dari penjualan ini merupakan

bentuk kompensasi dari kemudahan yang diperoleh pembeli atas penangguhan untuk tidak membeli secara tunai.

- 4) Penjualan secara kredit tidak lantas mengindikasikan bahwa harga barang yang lebih tinggi selalu berkaitan dengan waktu. Adakalanya penjual dapat menjual barang dengan harga yang lebih rendah dalam kondisi untuk menghabiskan stok barang dan memperoleh uang tunai karena kekhawatiran harga barang akan jatuh di masa yang akan datang. Dalam syariah sesungguhnya setiap baik buruknya suatu akad ditentukan oleh akad itu sendiri tidak berkaitan dengan akad lainnya.

b. Abu Hanifah (80–150 H/699–767 M)

Abu Hanifa Al-Nu'man Ibn Sabit Bin Zauti, ahli hukum agama Islam di lahirkan di Kufa pada 669 M semasa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Beberapa karyatulis beliau antara lain al-Makharif fi al-Fiqih, al-musnad, dan Al-fiqh Al-akbar. Berikut ini sumbangsih konsep ekonomi dari Abu Hanifah.

- 1) Transaksi salam, yaitu suatu bentuk transaksi di mana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak disepakati. Abu Hanifah mengkritisi kontrak tersebut yang cenderung mengarah kepada perselisihan antara yang memesan barang dengan cara membayar terlebih dahulu, dengan orang yang membelikan barang. Beliau mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merinci lebih jauh apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditi, kualitas, waktu, dan tempat pengiriman. Beliau memberikan persyaratan bahwa komoditi tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan pengiriman.
- 2) Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah bertransaksi beliau memberikan contoh murabahah. Dalam Murabahah persentase kenaikan harga (*mark up*) didasarkan atas kesepakatan anatar penjual dan pembeli terhadap harga pembelian yang pembayarannya diangsur. Pengalaman Abu Hanifa di bidang perdagangan menjadikan beliau dapat menentukan mekanisme yang lebih adil dalam transaksi ini dan transaksi yang sejenis. Abu Hanifah sangat perhatian pada orang-orang lemah. Abu Hanifah tidak membebaskan perhiasan dari zakat dan akan membebaskan kewajiban membayar zakat bagi pemilik harta yang dililit utang. Beliau tidak memperbolehkan pembagian panen (*muzara'ah*) dari

penggarap kepada pemilik tanah dalam kasus tanah tidak menghasilkan apapun. Hal ini dilakukan untuk untuk melindungi para penggarap yang umumnya orang lemah.

Daftar Pustaka

- Amin, DH. 2018. *Ekonomi Syariah, Ciri-ciri, Tujuan, Dasar Hukum dan Bentuk Kerja samanya*. Dosenekonomi.com. <https://goo.gl/4LMZRq>.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1980. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Al Arif, M. Nur Rianto, dkk. 2010. *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Al Qur'an dan Terjemahannya: Departemen Agama RI, (2000), Bandung.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Alma, Buchari. (2007). *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Subki, Thabaqat, al-Syafi'iyat al-Kubra, Juz IV. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, t.th.
- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- _____. 2009. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing.
- Arham Haryadi. 4 November 2018. *Manfaat Penerapan Sistem Ekonomi Syariah*. Deerham.com. <https://goo.gl/fEmgqF>.
- Arifin, Zaenul. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Pustaka Alfabet.
- Bellamy, Richard. 1992. *Liberalism and Modern Society*, Polity, hlm. 165.
- Bendix, Reinhard. 1960. *Max Weber: An Intellectual Portrait*. Doubleday. ISBN 052003194.
- Bendix, Reinhard; Roth, Guenther. 1971. *Scholarship and Partisanship: Essays on Max Weber*. University of California Press.

- Bertrand Badie; Dirk Berg-Schlosser; Leonardo Morlino. 2011. *International Encyclopedia of Political Science*. SAGE Publications, Inc.
- Brander, James A. 2006. *Government policy toward business*. 4th ed. Mississauga, Ontario: John Wiley & Sons Canada, Ltd.,
- Busky, Donald F. 2000. *Democratic Socialism: A Global Survey*. Praeger.
- Campbell Jones, Martin Parker, Rene Ten Bos. 2005. *For Business Ethics*. Routledge.
- Capitalism' Oxford Dictionaries. 'capitalism. an economic and political system in which a country's trade and industry are controlled by private owners for profit, rather than by the state.' Retrieved 4 January (2013).
- Chalil, Zaki Fuad. 2009. *Pemerataan Distribusi Kekeyaan Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Chapra, Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2001. *The Future of Economics: An Islam ic Perspective*, edisi terjemahan. Jakarta: SEBI.
- Dimiyati, Ahmad. 2008. *Teori Keuangan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Djazuli, A., Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Erfanie, Sairi. 2005. *Kebijakan Anggaran Pemerintah, dalam Buku 'Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Frances Goldin, Debby Smith, Michael Smith. 2014. *Imagine: Living in a Socialist USA*. Harper Perennial.
- Frederick Rosen. 2003. *Classical Utilitarianism from Hume to Mill (Routledge Studies in Ethics & Moral Theory)*..
- Gitosudarmo, Indriyo. 2002. *Manajemen Operasi, Edisi Kedua*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Glahe, ed. 1977. *Adam Smith and the Wealth of Nations*.
- Griffin, Ricki W. dkk. 2003. *Bisnis. Alih Bahasa Edina C. Tarmidzi*. Edisi 6. Jakarta: Prenhallindom.
- Hadiyan, Edwin. 2014. *Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Prinsip Fiqih Muamalah Dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *Jurnal. Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya*.

- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Haneef, Mohamed Aslam. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Rajawali.
- Hasan, Hasan Ibrahim. 1967. *Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Din wa al-Saqafi wa al-Ijtima'i. Cet. I*; Kairo: Maktabah al-nahdhah al-Misriyah.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hofmann, Murad. 2002. *Menengok Kembali Islam Kita*. Pustaka Hidayah.
- Ibrahim, Quthb Muhammad. 2003, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khatab, Islam Ramatan.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Izzan, Ahmad dan Syahril Tanjung. 2006. Referensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Offset.
- James Buchan. 2006. *The Authentic Adam Smith: His Life and Ideas*.
- Kaesler, Dirk. 1989. *Max Weber: An Introduction to His Life and Work*. University of Chicago Press.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman. 2002. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro, The International Institute of Islamic Thought Indonesia*, Jakarta.
- Korotayev A., Malkov A., Khalitourina D. 2006. Introduction to Social Macrodynamics. Moscow: URSS. [1] (Chapter 6: Reconsidering Weber: Literacy and 'the Spirit of Capitalism').
- Koto, H. Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Grafindo Pratama.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Cetakan. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. A Mannan. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Intermedia.
- Mahmud, Abd. Halim. 1988. *Qadhiyat al-Tasawwuf, al-Munqiz min al-Dhalal*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1992. *Ekonomi Islam:Teori dan Praktek*. Jakarta: Intermedia.
- Mansyur, Kahar. 1992. *Bulughul Maram*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Marthon, Said Sa'ad. 2001. *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.

- _____. 2004. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- McMurty, John. 1999. *The Cancer Stage of Capitalism*. Pluto Press..
- Misanam, Munrokhim, dkk. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mommsen, Wolfgang. 1974. *Max Weber and German Politics, 1890-1920*. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
- Muchlisin, Riadi. 2016. *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*. Kajianpustaka.com – <https://goo.gl/gGYDsG>.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Muller, Jerry Z. 1995. *Adam Smith in his Time and Ours: Designing the Decent Society*. Princeton Univ. Press.
- Muller, Jerry Z. 2002. *The Mind and the Market: Capitalism in Western Thought*. Anchor Books.
- N. Scott Arnold. 1998. *The Philosophy and Economics of Market Socialism: A Critical Study*. Oxford University Press. p. 8.
- Nasution, Harun. 2008. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nasution, Harun. 1995. *Falsafat dan Mistisme dalam Islam*. Cet. IX; Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Hasyimsyah. 2002. *Filsafat Islam. Cetakan Ke III*; Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nata, Abuddin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nove, Alec. 2008. *Socialism*. New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition.
- P. J. O'Rourke. 2006. *On The Wealth of Nations Books That Changed the World*.
- Perpustakaan RI. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru van Hoeve.
- Philip K. Hitti. 1974. *History of Arabs, From the Earliest to The Present*. Macmillan dan St. Martin's Press.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/P3EI. (2012). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta kerja sama dengan Bank Indonesia. 2012. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Radkau, Joachim 2005. *Max Weber The most important Weber-biography on Max Weber's life and torments since Marianne Weber*.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

- Rahman, Afzalur. 2000. Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan. Terjemahan: M. Arifin. Jakarta: PT Rineka Cipta. *Economic Doctrines of Islam*. Terjemahan. Soeroyo Nastangin. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2008. *Islam Aktual*, Bandung: Mizan.
- Richard F. Teichgraber. 1986. *Free Trade and Moral Philosophy: Rethinking the Sources of Adam Smith's Wealth of Nations*.
- Richard Swedberg, 2000. *Max Weber and the Idea of Economic Sociology*. Princeton: Princeton University Press.
- Rosser, Mariana V. and J Barkley Jr. 2003. *Comparative Economics in a Transforming World Economy*. MIT Press..
- Roth, Guenther. 2001. *Max Webers deutsch-englische Familiengeschichte*. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
- Samuel Hollander. 1973. *The Economics of Adam Smith*. University of Toronto Press.
- Scott, John. 2005. *Industrialism: A Dictionary of Sociology*. Oxford University Press.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Menabur Pesan Illahi Al-Qur'an dan Dinamika ISLAMADINA*, Volume XVIII, No. 1, Maret 2017: 37-56.
- Shihab, Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Penerbit: Mizan.
- Simanjuntak, Payaman. 2003. *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sinclair, Upton. 1918. *Upton Sinclair's: A Monthly Magazine: for Social Justice, by Peaceful Means If Possible*.
- Stephen Copley and Kathryn Sutherland, eds. *Adam Smith's. 1995. Wealth of Nations: New Interdisciplinary Essays*.
- Sudarsono, M.B, Hendri. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sulaiman, Fatiyah Hasan. 1964. *Mazhab al-Tarbawi ind al-Ghazali*. Kairo: Maktabat Nahdat Mishr.
- Sule, Ernie Trisnawati. 2008. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Susanti, Dyah Ochtorina. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah Pembentuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Berdasar Akad Musyarakah*. Jember: Jember University Press.
- Syarif, M.M. 1993. *Para Filosof Muslim*. Bandung: Mizan.
- Terjemahan Al-Qur'an dari Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud. UIKA Bogor'. 2018. *Waspada: Jurnal Online*. Swipa.
- Weber, Marianne. 1988. *Max Weber: A Biography*. New Brunswick: Transaction Books..

- Williams, Raymond. 1983. *Capitalism. Keywords: A vocabulary of culture and society, revised edition*. Oxford University Press.
- Zachary A. Goldfarb and Michelle Boorstein. 2013. *Pope Francis denounces 'trickle-down' economic theories in critique of inequality*. The Washington Post. Retrieved 26 November 2013.
- Zainuddin, Ali. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Zakiy, Abdullah Al Kaaf. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pusaka Setia.

Tentang Penulis



Dr. Hj. Sri Wahyuni, M.Si., kelahiran Samarinda, adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda. Gelar Sarjana Ekonomi, Magister Sains, dan Doktor Ilmu Manajemen diperoleh dari almamaternya.

Di antara penelitiannya adalah *Implementasi Konsep Zakat Produktif dalam Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Kalimantan Timur* yang dipresentasikan pada Konferensi Antar Bangsa di Brunei Darussalam tahun 2012.

Juara MTQ Internasional 2012 di Teheran-Iran ini pernah menerbitkan buku berjudul *Entrepreneurship dan Kinerja Usaha Mustahik*, terbit tahun 2018.